

**KETIDAKADILAN GENDER TERHADAP PEREMPUAN  
DALAM NOVEL *PERAWAN REMAJA DALAM  
CENGKERAMAN MILITER* KARYA PRAMOEDYA ANANTA  
TOER: TINJAUAN KRITIK SASTRA FEMINIS**



**S K R I P S I**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Sarjana Sastra  
pada Fakultas Sastra  
Universitas Hasanuddin**

**Oleh:**

**SYLVIA RIZKY**

**Nomor Pokok : F111 09 002**

**MAKASSAR**

**2014**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penyelesaian skripsi ini merupakan upaya penulis memenuhi salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh gelas Sarjana Sastra pada jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari adanya berbagai kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis selalu membuka diri untuk menerima kritikan dari berbagai pihak sebagai bentuk upaya penyempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapat bantuan, dorongan, semangat dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, selayaknyalah pada kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih terkhusus kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Burhanuddin dan Ibunda Hj. Marhani serta kedua adikku, Ricky Bur dan Dian Permata Sari. Begitu pun suamiku Akbar dan mertuaku H. Sappewali dan Hj. Sibur Ibrahim yang tak pernah luput mendoakan, memotivasi dan memberikan perhatian penuh terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Dra. St. Nursa'adah, M.Hum. dan Dra. Hj. Muslimat, M.Hum. selaku pembimbing pertama dan kedua yang telah memberikan waktunya dengan sabar dalam memberikan bimbingan, perhatian, gagasan, serta ide-ide dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Drs. H. Dahlan Abubakar, M.Hum. dan Dra. Haryeni Tamin, M.Hum. selaku penguji pertama dan kedua yang telah memberikan pencerahan terhadap skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Ketua dan Sekretaris Jurusan Sastra Indonesia, Dr. AB. Takko Bandung, M.Hum. dan Drs. H. Tammase, M.Hum.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing penulis selama berada di kampus merah ini khususnya Sastra Indonesia. Terkhusus untuk Prof. Dr. Lukman, M.S. sebagai penasehat akademik.
6. Ibu Aerani Hamsah, S.Sos. dan karyawan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin yang telah melayani keperluan administrasi penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
7. Kak Sarmiati, S.H., Baso Rayu, S.Sos., Bapak Abdullah, S.Hut. Ibu Dra. Norma, M. Pd., dan Hj. Darmawati atas bantuan, bimbingan dan nasehatnya selama ini.
8. Tujuh Perempuan Terbaikku Sri Wahyuni, S.S., Marlina, Risnawati, S.S., A. Evi Putri Sari, S.S., Zulfahmi, S.S., Hardiyanti, S.S., dan Ayu Chulasty, S.S. Kita terlahir dari mata air yang sama.
9. Saudara seperjuanganku, Erni, Astuti, Reski Mulia Utami, S.S., Jumriani, S.Pd., Putry Multika Sari, S.Sos., Asriani Syam, Nirmalasari, Hj. Fitriani, S.Pd., Novitasari AmdKeb., A. Iqbal, Irvan Hayyun, S.H. dan Rahman, AmdKep. yang tak pernah lepas memberikan dukungan sejak kecil. Kalian luar biasa, Saudara.

10. Sahabatku Narasi 09 “Baronk, Caddo, Ndut, Diwan, Muh, Ensen, Fian, Benjo, Jo, Yudhi, Slamet, Amy, Mama’na, Ikha, Irha, Febry, Nenek, Anti 2, Vj, Bisma, Cha’, Hermin, Whawha, Dhyla, Yuly” (Kisah kita tak akan terhapus dalam peraduan hidupku) dan Padewakkang 09 (Pernah kita sama-sama susah, terperangkap di dingin malam)
11. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Sastra Indonesia “ Ayah Accunk, Kak Firo, Kak Faika, Kak Bolu cukke, Kak Ikki, Kak Aan, Kak Avost, Kak Fajar, Kak Asri, Kak Fhaad. Kak Bondenk, Kak Zul, Kak Tian, Kak Amil, Kak Toy, Kak Gandy, Kak P-man, Kak Ros, dan Opsi 07. Kak Ichal, Kak Busan, Kak Kifli, Kak Tafa, Kak Toto, Kak Allu, Kak Chita, Kak Bila, dan Diksi 08. Arif, Imran, Sandy, Amul, Muthe, Sahara, Viqa, Ramdha, Cancu, Iwan, Iman, Fitto, Idung, dan Argumentasi 10. Kamsah, Arlan, Gusti, Rinal, Ina, Irma, Mimi, Winda, Jannah, Verlin, Rini, Nanda, Lylis, Ayu, Ifah, Anti, Ibnu, Rahma, Randi, Nur, dan Deskripsi 11. Agus, Faisal, Ulla, Ria, Dillah, dan Dialektika 12. Reski, Jenjen, Inna, Indah, dan Ekspresi 13 serta Mama Indah “Mace Kolong” yang telah menjadi bagian orang-orang terbaik dalam kehidupanku.
12. Keluarga Kecilku “Kak Resnita Dewi, S.S., M.Hum., Irma Hasnan, Radiah Puspita Utoyo, Ikadarsi Yuliandari, Julita, Mutmainnah, Agung Gumilang”. Kalian istimewa.
13. Lentera Kita, SPaSI, SUAR (Suara Rakyat -Kak Soren, Kak Bur FKM, Kak Ippang FKM, Kak Palli FKM, Kak Ai’ HIMASPA), UKMM (Unit Kegiatan Menulis Mahasiswa- Kak Fuad, Kak Eka, Ardina, Ainun, Ayu,

Maria), UKPM (Kak Caco, Kak Abhot, Kak Wahyu, Kak Reza, Kak Dini, Kak Taufik, Tatang, Takwin) yang telah mengajarkanku bergaul dengan dunia jurnalistik dan kesenian.

14. Kawan-kawan KKN 84 Kec. Bangkala Kab. Jeneponto, khususnya Desa Marayoka, Yulismayanti, Musnain M. Umakapa, Mahfudz Shah Mustari. Untuk Almarhuma Ibu Desa (Daeng Kebo) dan Bapak Sudding, S.Pdi, Kak Rohani, Kak Aliono, Bapak Basir Serang, Pak Wahyuddin, S.Pd. dan adikku Rahmi Narti. Terima kasih telah menjagaku selama berada di Marayoka.

Penulis menyadari skripsi ini memunyai banyak kekurangan baik dalam hal sistematika penulisan maupun dari segi isi, sehingga kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Penulis

Makassar, 10 Desember 2013

## DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	x
ABSTRACK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Ruang Lingkup Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Landasan Teori.....	10
B. Hasil Penelitian yang Relevan.....	16
C. Kerangka Pemikiran.....	20
D. Bagan Kerangka Pemikiran.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Desain Penelitian .....	22
B. Metode Pengumpulan data .....	23
C. Instrumen Penelitian .....	24
D. Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	26
E. Metode Analisis Data .....	29
F. Prosedur Penelitian .....	30
G. Sistematika Penulisan .....	31

BAB IV PEMBAHASAN .....	32
A. Hasil Penelitian.....	32
B. Ketidakadilan Gender yang Dialami Perempuan .....	33
1. Stereotipe.....	33
2. Kekerasan .....	48
3. Subordinasi .....	57
4. Beban Kerja .....	65
5. Marginalisasi .....	72
C. Dampak dari Ketidakadilan Gender yang Dialami Oleh Perempuan.....	81
1. Beban Moral.....	81
2. Beban Psikologis (Mental).....	88
3. Hancurnya Idealisme.....	95
4. Kemerosotan Peradaban dan Kebudayaan .....	100
5. Hilangnya Nilai-Nilai Kemanusiaan.....	105
BAB V PENUTUP.....	111
A. Simpulan.....	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	113
LAMPIRAN	

## ABSTRAK

**SYLVIA RIZKY. *Ketidakadilan Gender terhadap Perempuan dalam Novel Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer karya Pramoedya Ananta Toer: Suatu Tinjauan Kritik Sastra Feminis*: (dibimbing oleh St. Nursa'adah dan Muslimat)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan memahami ketidakadilan gender yang dialami oleh para tokoh perempuan serta dampak yang ditimbulkan dari ketidakadilan gender tersebut dalam novel *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer* serta kaitannya dengan realitas sosial masyarakat. Penelitian ini menggunakan kritik sastra feminis sebagai alat analisis yang dipersentuhkan dengan pandangan feminis sosialis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu mendeskripsikan ketidakadilan gender terhadap tokoh perempuan dan dampak dari ketidakadilan gender tersebut yang dikaitkan dengan realitas sosial masyarakat. Data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder yang ditemukan melalui teknik catat. Pengumpulan data primer dilakukan dengan studi kepustakaan melalui novel *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer*, sedangkan data sekunder diperoleh dari referensi yang terdiri atas sejumlah buku situs internet, artikel dan jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian. Data primer dan data sekunder lalu dihubungkan untuk menemukan keterkaitan di antara keduanya.

Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakadilan gender yang dialami oleh para tokoh perempuan baik pada masa penjajahan Jepang maupun ketika mereka menjadi korban buangan di Pulau Buru. Ketidakadilan gender yang dialami tokoh perempuan di antaranya, stereotipe, kekerasan, subordinasi, beban kerja, dan marginalisasi. Para tokoh perempuan digambarkan sebagai perempuan yang belum mampu keluar dari segala bentuk penindasan dan belenggu adat yang menimpanya. Oleh karena itu, ketidakadilan gender tersebut melahirkan berbagai dampak seperti, beban moral, beban psikologis (mental), hancurnya idealisme, kemerosotan peradaban dan kebudayaan serta hilangnya nilai-nilai kemanusiaan. Ketidakadilan gender yang dialami tokoh perempuan dalam novel *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer* dialami pula oleh para perempuan pada realitas sosial masyarakat.

Kata Kunci: ketidakadilan gender, perempuan, novel *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer*, Kritik Sastra Feminis.



## ABSTRACT

**SYLVIA RIZKY.** *Gender Inequality Against Women In The Novel Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer by Pramoedya Ananta Toer: An Literature of Feminist Literary Critism:* (supervised by St. Nursa'adah and Muslimat)

This study aims to reveal and understand gender inequality experienced by women leaders as well as the impact of the gender inequality in the novel *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer* and its relation to social reality. This research uses the Literary Feminist Criticism as an analytical tool with a view of socialist feminism.

Methods used in this study is qualitative methods tahr describe the gender inequality against women leaders and the impact of gender inequality associated with social realities. This research data derived from primary data and secondary data found through engineering notes. Primary data collection is done by the study of literature through novel *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer*, while the secondary data obtained from reference consisting of a number of books, websites, articles, and journals related to the object of research. Primary data and secondary data and linked to discover linkages between them.

The results showed the existence of gender inequality experienced by women leaders both during the Japanese occupation and when they become outcasts in Buru Island. Gender inequalities experienced by women leaders, among them, stereotypes, violence, subordination, workload, and marginalization. The women leaders portrayed as a woman who has not been able to get out of all forms of oppression and custom shackles that happened. Therefore, the gender inequality spawned a variety of effects, such as, moral burden, the burden of psychological (mental), the destruction of idealism, decadence of civilization and culture as well as the loss of human values. Gender inequalities experienced by women leaders in the novel also experienced by women on social Reality.

Key words: gender inequality, women, novel *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer*, feminist literary criticism.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan perempuan di Indonesia tidak lepas dari berbagai permasalahan. Anggapan-anggapan tidak menguntungkan perempuan pun muncul sehingga perempuan berada pada posisi subordinat dan membentuk citra inferior. Perempuan pun dianggap lemah, bodoh, miskin, dan tidak memiliki kesempatan atau hak yang sama dengan laki-laki. Hal tersebut berbanding terbalik dengan posisi laki-laki yang selalu dianggap lebih tinggi dari perempuan sehingga membentuk citra superior.

Perempuan dengan segala pelabelan negatif yang disandangnya pun harus patuh terhadap aturan atau tradisi-tradisi yang berlaku di lingkungannya. Umumnya, perempuan dihadapkan pada aturan seperti, dilarang berinteraksi dengan dunia luar, perempuan harus setia dan patuh terhadap putusan laki-laki, serta perempuan tidak boleh menjadi pemimpin dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga.

Oleh karena itu, perempuan hanya memiliki gerak di ranah domestik saja. Peran perempuan sebagai istri atau ibu rumah tangga pun harus diterima. Sehingga, pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak merupakan pekerjaan perempuan yang harus dilaksanakan sedangkan laki-laki bebas memilih pekerjaan di ranah publik. Hal tersebut membuktikan bahwa kekuasaan yang

dimiliki perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki dalam proses sosial.

Tidak hanya itu, perempuan dalam posisi kelemahannya menjadikan laki-laki leluasa bertindak kasar. Kekerasan-kekeraan yang dialami perempuan terjadi di ranah domestik bahkan terjadi pada perempuan yang berhasil keluar dari kungkungan adat atau ranah publik. Kekerasan yang dialami perempuan berupa kekerasan psikis maupun fisik.

Hal-hal tersebut merupakan bentuk perbedaan gender yang dilekatkan kepada perempuan dan laki-laki dalam lingkungan masyarakat. Salah satu definisi gender yang dikemukakan oleh Sugihastuti dan Sastriyani (2007:72) adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya konstruksi sosial perempuan yang dikenal lembut, lemah, emosional, dan keibuan, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa.

Perbedaan gender yang sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan (Fakih, 2012:12).

Dalam karya sastra, pembicaraan mengenai kisah atau kehidupan perempuan di Indonesia sudah banyak ditemukan. Hal tersebut menguatkan asumsi bahwa perempuan memang menarik untuk diteliti karena berbagai problematika kehidupan yang dialaminya terlebih dengan persoalan gender

yang dialami. Seperti yang disebutkan dalam buku yang berjudul *Feminisme untuk Pemula* (Marisa dkk:2007) “Perempuan dibesarkan untuk menjadi mainan dari laki-laki, yang menari seirama dengan kemauan laki-laki dan harus bisa menghibur laki-laki kapan pun dikehendaki”. Perempuan adalah sosok yang memunyai dua sisi. Di satu pihak, perempuan adalah keindahan. Pesonanya dapat membuat laki-laki tergila-gila. Di sisi yang lain, ia dianggap lemah. Anehnya, kelemahan itu dijadikan alasan oleh laki-laki jahat untuk mengeksploitasi kecantikannya (Sugihastuti, 2007:2).

Karya sastra yang lahir sedikit banyaknya tidak lepas dari hegemoni laki-laki terhadap perempuan. Misalnya, kasus-kasus kekerasan atau kawin paksa yang dialami perempuan dalam novel-novel menjadi petunjuk dari anggapan negatif terhadap perempuan. Hal tersebut tentunya berhubungan dengan prasangka gender atau anggapan yang salah kaprah tentang gender dan jenis kelamin. Bentuk-bentuk prasangka gender dapat dilihat dalam novel-novel Balai Pustaka misalnya, novel *Siti Nurbaya* (1922) karya Marhaen yang menggambarkan fenomena prasangka gender dan emansipasi perempuan dalam hubungannya dengan adat lama.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah prasangka gender yang kemudian mendorong munculnya emansipasi perempuan. Novel *Saman* karya Ayu Utami misalnya, yang menggambarkan kehidupan perempuan yaitu Laila, Shakuntala, Cok, dan Yasmin digambarkan sebagai perempuan mandiri dan bebas dari segala kungkungan aturan atau adat.

Masalah prasangka gender seperti yang disebutkan sebelumnya berawal dari anggapan yang salah mengenai gender dan kodrat. Gender sering dianggap sebagai kodrat yang tidak dapat lagi diubah dan setiap orang harus berterima dengan ketentuan itu, sedangkan gender sesungguhnya hanyalah penyifatan laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosio kultural. Berangkat dari hal tersebut, prasangka gender melahirkan ketidakadilan gender. Topik-topik yang seperti itulah kemudian banyak dibahas dalam karya sastra terutama ketidakadilan gender terhadap perempuan.

Bentuk-bentuk ketidakadilan gender seperti, marginalisasi, subordinasi, stereotipe, beban kerja, dan kekerasan banyak dialami perempuan dalam karya sastra. Adanya bentuk-bentuk ketidakadilan gender tersebut semakin menekankan bahwa masyarakat masih setia pada berbagai anggapan perempuan sebagai makhluk yang lemah dibandingkan dengan laki-laki. Oleh karena itu, perempuan selalu berada pada posisi ketergantungan atau kekuasaan laki-laki. Terlebih jika masyarakat tersebut masih memegang teguh adat dan aturan di lingkungannya.

Bentuk-bentuk ketidakadilan gender tergambar pula dalam novel *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer* karya Pramoedya Ananta Toer. Novel tersebut menjelaskan permasalahan ketidakadilan gender yang dialami tokoh perempuan baik pada tahun 1940-an ketika Jepang menjajah di Indonesia maupun pada tahun 1970-an ketika para tokoh perempuan korban jajahan Jepang tersebut menjadi buangan yang hidup dengan aturan adat di Pulau

Buru. Pada novel tersebut digambarkan begitu banyaknya perempuan Indonesia yang mengalami keterpurukan.

Novel PRCM secara implisit menceritakan tentang tokoh perempuan Indonesia secara umum, perempuan Jawa pada khususnya. Kehadiran Jepang menjajah Indonesia, membuat para tokoh perempuan Indonesia hidup di bawah tekanan yang berat. Pada masa pendudukan Jepang tersebut, tokoh perempuan dijanjikan untuk bersekolah di Tokyo dan Singapura. Namun, kenyataan yang dialami para tokoh perempuan itu hanya dijadikan sebagai wanita penghibur atau budak seks bagi para serdadu Jepang. Realitas yang dialami bangsa Indonesia khususnya perempuan pada masa pendudukan Jepang adalah para perempuan mengalami ketidakadilan terutama eksploitasi seksual. Lalu, dikenal dengan istilah *jugun ianfu*.

Sepanjang sejarah dunia, hanya Jepang yang menyediakan wanita penghibur untuk para serdadu tentaranya. Para perempuan atau *jugun ianfu* tersebut umumnya berpendidikan rendah, bahkan ada yang tidak berpendidikan sama sekali serta buta huruf. Selain kerendahan yang dimilikinya, mereka juga berada ke dalam jeratan ekonomi yang membelit (Galih, Kompasiana: 25/9/2012).

Posisi tokoh perempuan pada masa pendudukan Jepang sebagai budak seks semakin tidak berarti ketika para serdadu Jepang tidak memberi upah kepada mereka. Janji-janji manis yang diterimanya dibalas dengan perbuatan keji dan tidak manusiawi. Setelah para tokoh perempuan tersebut memenuhi nafsu bejat para serdadu Jepang, mereka lalu dibuang dan diterlantarkan. Salah

satu wilayah yang menjadi tempat pembuangan para tokoh perempuan tersebut adalah Pulau Buru di Maluku.

Keberadaan para tokoh perempuan korban serdadu Jepang banyak ditemukan oleh para tapol sekitar tahun 1970 di Pulau Buru. Usia para tokoh perempuan tersebut pun tidak muda lagi. Penderitaan perempuan belum berakhir karena mereka harus berhadapan dengan suku Alfuru yang masih memegang teguh adat istiadat mereka. Kehidupan suku Alfuru pun masih primitif. Para tokoh perempuan dipertukarkan dengan barang. Selain itu, tokoh perempuan harus patuh terhadap suami, bahkan dilarang berinteraksi dengan orang asing terlebih jika bahasa yang digunakan sangat berbeda dengan bahasa mereka.

Kondisi tokoh perempuan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tergambarkan secara rinci dalam novel tersebut. Perempuan tidak hanya mengalami ketidakadilan gender ketika Jepang menjajah Indonesia, akan tetapi dialami pula ketika mereka dibuang ke pulau yang penghuninya masih primitif dan kepercayaan terhadap adat istiadatnya masih kuat dan kental.

Novel *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer* karya Pramoedya Ananta Toer ini dipilih sebagai objek kajian berdasarkan tiga alasan. Pertama, teknik penceritaan Pram dalam novel tersebut jelas dan memiliki ciri khas yang menampilkan hasil wawancara langsung dengan beberapa tokoh yang terkait dengan pembuktian peristiwa dalam novel tersebut. Kedua, novel tersebut menggambarkan tentang kehidupan tokoh perempuan pada masa pendudukan Jepang (1945) dan pada masa 1970-an ketika perempuan tersebut

menjadi buangan di Pulau Buru. Sehingga menarik untuk diungkapkan bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang dialami perempuan pada masa itu. Ketiga, belum ditemukannya karya ilmiah yang membahas mengenai novel tersebut dari sudut pandang mana pun.

## **B. Rumusan dan Ruang Lingkup Masalah**

Dalam objek kajian tersebut, ada beberapa masalah yang ditemukan. Berikut identifikasi masalahnya:

1. Perempuan mengalami ketidakadilan gender dan dampak yang ditimbulkan.
2. Jepang mengumbar janji-janji manis untuk bangsa Indonesia.
3. Pemerintah Indonesia kurang memerhatikan warganya yang mengalami ketertindasan.
4. Kesengsaraan yang dialami bangsa Indonesia dalam cengkraman militer.

Masalah-masalah di atas, selanjutnya dibatasi untuk diteliti dan diungkapkan dalam penelitian. Adapun batasan masalahnya, yaitu ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan serta dampak dari ketidakadilan gender yang dialami baik dalam novel maupun di lingkungan masyarakat. Berdasarkan batasan masalah tersebut maka penelitian ini difokuskan pada rumusan masalah di bawah ini:



1. Bagaimana ketidakadilan gender yang dialami perempuan dalam novel *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer* dan kaitannya dengan masyarakat?
2. Bagaimana dampak ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan dalam novel *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer* dan kaitannya dengan masyarakat?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan dalam novel *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer* dan kaitannya dengan masyarakat.
2. Menjelaskan dampak dari ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan dalam novel *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer* dan kaitannya dengan masyarakat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berhasil dengan baik dan dapat mencapai tujuan penelitian secara optimal. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai studi analisis tentang sastra Indonesia, terutama

dalam bidang penelitian novel Indonesia yang memanfaatkan teori feminis dan kritik sastra feminis.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam mengaplikasikan teori sastra dan kritik sastra feminis dalam mengungkapkan bentuk-bentuk ketidakadilan gender terhadap perempuan dalam novel *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer*.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi bahan bacaan yang dapat meningkatkan wawasan bagi pembaca khususnya mengenai novel *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer* karya Pramoedya Ananta Toer.
- b. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian ilmiah selanjutnya.
- c. Dapat menjadi penerangan bagi masyarakat umum tentang karya sastra dan khususnya mengenai persoalan ketidakadilan gender terhadap perempuan yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

Penggunaan teori sangat penting dalam penelitian ilmiah. Oleh karena itu, berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini menggunakan kritik sastra feminis sebagai alat analisis. Kritik sastra feminis ini menjadi alat untuk mengungkapkan gambaran bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang dialami perempuan dalam novel *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer*.

Istilah yang digunakan dalam penelitian sastra dengan menggunakan teori feminis sebagai alat bedah adalah kritik sastra feminis. Kritik sastra feminis adalah salah satu kajian karya sastra yang mendasarkan pada pandangan feminisme yang menginginkan adanya keadilan dalam memandang eksistensi perempuan, baik sebagai penulis maupun dalam karya-karya sastranya.

Feminisme sebagai gerakan pada mulanya berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi serta usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut (Fakih, 2012:99). Salah satu alasan yang mendukung hal ini adalah kenyataan bahwa feminisme tidak hanya memperjuangkan masalah gender, tetapi juga masalah kemanusiaan.

Oleh karena itu, feminisme merupakan teori tentang persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki di bidang politik, ekonomi, sosial, publik, atau kegiatan terorganisasi yang memperjuangkan hak-hak serta kepentingan perempuan (Sugihastuti dan Sastriyani, 2007:64).

Ada beberapa perspektif yang digunakan dalam menjawab permasalahan perempuan yaitu feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme marxis, feminisme sosialis, dan feminisme psikoanalisis. Kesemua perspektif tersebut menjelaskan keterbelakangan yang dialami oleh perempuan, sebab-sebabnya dan strategi yang digunakan untuk melepaskan diri dari keterbelakangan tersebut.

Feminisme liberal dalam mendefinisikan masalah kaum perempuan, tidak melihat struktur dan sistem sebagai pokok persoalan. Asumsi dasar feminisme liberal berakar pada pandangan bahwa kebebasan (*freedom*) dan kesamaan (*equality*) berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan dunia publik. Kerangka kerja feminisme liberal dalam memperjuangkan persoalan masyarakat tertuju pada '*kesempatan yang sama dan hak yang sama*' bagi setiap individu, termasuk di dalamnya kesempatan dan hak kaum perempuan.

Kesempatan dan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan ini penting bagi mereka dan karenanya tidak perlu pembedaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Asumsinya, karena perempuan adalah makhluk rasional juga. Dengan kata lain, jika sistem sudah memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan maka, jika kaum perempuan tidak mampu bersaing dan kalah, yang perlu disalahkan adalah kaum perempuan sendiri (Fakih, 2012:81-82).

Selanjutnya, feminisme radikal tidak melihat adanya perbedaan antara tujuan personal dan politik, unsur-unsur seksual atau biologis. Sehingga,

dalam melakukan analisis tentang penyebab penindasan terhadap kaum perempuan oleh laki-laki, mereka menganggapnya berakar pada jenis kelamin laki-laki itu sendiri beserta ideologi patriarkinya. Dengan demikian, 'kaum laki-laki' secara biologis maupun politis adalah bagian dari permasalahan. Dari situ aliran feminisme ini menganggap bahwa penguasaan fisik perempuan oleh laki-laki, seperti hubungan seksual, adalah bentuk dasar penindasan terhadap kaum perempuan (Jaggar dalam Fakih, 2012:84-85).

Feminisme marxis dipengaruhi oleh ideologi kelas Karl Marx. Feminisme Marxis mengidentifikasi kelasisme sebagai penyebab opresi (penindasan) terhadap perempuan. Opresi terhadap perempuan tersebut bukanlah hasil tindakan sengaja dari satu individu, melainkan produk dari struktur politik, sosial, dan ekonomi tempat individu itu hidup (Tong dalam Wiyatmi, 2012:18).

Tujuan dari feminisme marxis adalah mendeskripsikan basis material ketertundukan perempuan dan hubungan antara model-model produksi dan status perempuan, serta menerapkan teori perempuan dan kelas pada peran keluarga (Humm dalam Wiyatmi, 2012:18). Oleh karena itu, mereka tidak menganggap patriarki ataupun kaum laki-laki sebagai permasalahan, akan tetapi sistem kapitalisme yang sesungguhnya merupakan penyebab masalahnya. Dengan begitu, penyelesaiannya pun harus bersifat struktural, yakni hanya dengan melakukan perubahan struktur kelas dan pemutusan hubungan dengan sistem kapitalisme internasional (Fakih, 2012: 88-89).

Feminisme sosialis, penindasan terhadap perempuan terjadi di kelas mana pun. Ketidakadilan bukan semata-mata disebabkan oleh kegiatan produksi atau reproduksi dalam masyarakat, melainkan juga karena manifestasi ketidakadilan gender yang merupakan konstruksi sosial. Oleh karena itu, yang mereka perangi adalah konstruksi visi dan ideologi masyarakat serta struktur dan sistem yang tidak adil yang dibangun atas bias gender.

Feminisme sosialis menggunakan analisis kelas dan gender untuk memahami penindasan perempuan. Feminisme ini sepaham dengan feminisme Marxis bahwa kapitalisme merupakan sumber penindasan terhadap perempuan. Akan tetapi, aliran feminisme sosialis ini juga setuju dengan feminisme radikal yang menganggap bahwa patriarkal merupakan sumber penindasan itu. Kapitalisme dan patriarki adalah dua kekuatan yang saling mendukung (Fakih, 2012: 90-93).

Oleh karena itu, feminis sosialis merupakan gerakan untuk membebaskan para perempuan melalui perubahan struktur patriarkat. Perubahan struktur patriarkat bertujuan agar kesetaraan gender dapat terwujud. Perwujudan kesetaraan gender adalah salah satu syarat penting untuk terciptanya masyarakat tanpa kelas, egaliter, atau tanpa hierarki horizontal. Perlu diadakannya penyadaran terhadap para perempuan bahwa mereka merupakan “kelas” yang tidak diuntungkan. Sehingga perlu diadakan konflik langsung dengan kelompok dominan atau laki-laki untuk meruntuhkan sistem patriarkat tersebut (Megawangi, 1999:134).

Feminisme psikoanalisis dengan mendasar pada konsep Freud, seperti tahapan *oedipal* dan kompleks *oedipus*, mengklaim bahwa ketidaksetaraan gender berakar dari rangkaian pengalaman pada masa kanak-kanak awal mereka. Pengalaman tersebut mengakibatkan bukan saja cara masyarakat memandang dirinya sebagai feminine, melainkan juga cara masyarakat memandang bahwa maskulinitas adalah lebih baik dari feminitas (Wiyatmi, 2012:18).

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa feminisme dalam kajian sastra disebut dengan feminisme sastra. Adapun alat analisisnya yaitu kritik sastra feminis. Batasan umum kritik sastra feminis dikemukakan oleh Culler bahwa kritik sastra feminis adalah “membaca sebagai perempuan”. Yang dimaksud “membaca sebagai perempuan” adalah kesadaran pembaca bahwa ada perbedaan penting dalam jenis kelamin pada makna dan perebutan makna karya sastra.

Kritik sastra feminis bukan berarti pengkritik perempuan, atau kritik tentang perempuan, juga bukanlah kritik tentang pengarang perempuan. Arti sederhana yang dikandungnya ialah pengkritik memandang sastra dengan kesadaran khusus; kesadaran bahwa ada jenis kelamin yang banyak berhubungan dengan budaya, sastra, dan kehidupan. Membaca sebagai perempuan berarti membaca dengan kesadaran membongkar praduga dan ideologi kekuasaan laki-laki yang androsentris atau patriarkhat (Sugihastuti dan Suharto, 2010: 19).

Namun, sebelum masuk pada masalah feminis, terlebih dahulu harus dipahami konsep seks dan gender. Seks (jenis kelamin) merupakan penyifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Seks atau jenis kelamin secara permanen tidak bisa berubah dan merupakan ketentuan biologis atau disebut sebagai kodrat (Fakih, 2012: 7-8).

Istilah gender diperkenalkan untuk mengacu kepada perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki tanpa konotasi-konotasi yang sepenuhnya bersifat biologis. Jadi, rumusan gender yang ini merujuk kepada perbedaan-perbedaan antara perempuan dengan laki-laki yang merupakan bentukan sosial; perbedaan-perbedaan yang tetap muncul meskipun tidak disebabkan oleh perbedaan-perbedaan biologis yang menyangkut jenis kelamin (Macdonald dkk, 1999:xii).

Bagi Mosse (2007:3) gender adalah seperangkat peran yang, seperti halnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini (yang mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan sebagainya) secara bersama-sama memoles “peran gender” kita.

Adanya perbedaan-perbedaan yang dilekatkan kepada jenis kelamin tersebut melahirkan perbedaan gender. Perbedaan gender itulah yang melahirkan ketidakadilan baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap



kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.

Fakih (2012:12) mengemukakan bahwa ketidakadilan gender termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni: Marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.

Dengan demikian, untuk mengungkapkan ketidakadilan gender yang dialami oleh tokoh perempuan dan dampaknya dalam novel *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer* tersebut maka yang akan digunakan oleh penulis sebagai alat analisis adalah kritik sastra feminis yang dipersentuhkan dengan pandangan feminisme sosialis dengan batasan yang dikemukakan oleh Culler mengenai “membaca sebagai perempuan” atau *reading as woman*.

## **B. Hasil Penelitian yang Relevan**

Penelitian terhadap novel *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer* karya Pramoedya Ananta Toer sejauh pengamatan penulis belum terdapat di lingkup mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin. Namun, permasalahan mengenai perempuan yang terdapat dalam karya sastra Indonesia telah banyak ditemukan dalam hasil penelitian yang lainnya.

Hasil penelitian yang membahas tentang perempuan di antaranya, penelitian yang dilakukan oleh Kristiana (2009) dengan judul *Citra*

*Perempuan dalam Novel Saman karya Ayu Utami (Suatu Tinjauan Kritik Sastra Feminis)*. Penelitian tersebut membahas empat tokoh yaitu Laila, Cok, Yasmin, dan Shakuntala. Hasil penelitian itu menggambarkan citra diri dan citra sosial keempat perempuan tersebut. Tokoh-tokoh dicitrakan sebagai perempuan yang mandiri. Mereka berusaha lepas dari kungkungan nilai-nilai tradisional dan budaya patriarki.

Penelitian selanjutnya yaitu *Gender dalam Novel Perempuan, Rumah Kenangan karya M.Aan Mansur (Tinjauan Kritik Sastra Feminis)* oleh Diana (2011). Dalam penelitian tersebut digambarkan bentuk ketidakadilan gender yang dialami tokoh-tokoh perempuan yang hidup secara tradisional. Tokoh-tokoh perempuan (Ibu dan Nenek) tersubordinasi dalam hal memperoleh pendidikan. Tidak hanya itu, Diana pun menambahkan penyajian stereotip terhadap seorang perempuan bangsawan yang tidak boleh menikah dengan lelaki di bawah derajatnya. Selain itu, digambarkan pula kekerasan yang dialami tokoh ibu, baik itu kekerasan emosional maupun kekerasan ekonomi.

Ada pula Tesis Fakultas Ilmu Budaya UGM dengan judul *Citra Wanita dalam Cerita Rakyat Makassar Suatu Tinjauan Kritik Sastra Feminis* oleh Muslimat (2005). Penelitian tersebut menggambarkan nilai-nilai tradisional Makassar dan adanya nilai-nilai baru sebagai gagasan yang dicita-citakan oleh masyarakatnya. Dari hal tersebut memunculkan citra perempuan pembawa ideologi feminis dan penentang bias androsentrisme. Hasil penelitian tersebut menunjukkan penolakan masyarakat terhadap nilai-nilai tradisional yang mengungkung kehidupan perempuan.

Tidak hanya itu, penelitian terhadap perempuan terdapat pula dalam skripsi Wardani (2009) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro dengan judul *Belenggu-Belenggu Patriarki: Sebuah Pemikiran Feminisme Psikoanalisis Toni Morrison dalam The Bluest Eye*. Penelitian tersebut memaparkan pola diskriminasi dan pengasingan terhadap tokoh perempuan kulit hitam yang disebabkan oleh konsep patriarki. Selain itu, dibahas pula mengenai belenggu patriarki lain terhadap beberapa tokoh perempuan yang ada dalam *The Bluest Eye* dan kondisi kejiwaan tokoh utama akibat belenggu patriarki serta cara tokoh tersebut keluar dari belenggu patriarki sehingga memperoleh kebahagiaan.

Selanjutnya, penelitian dengan judul *Eksistensi Tokoh Wanita dalam Novel Pertemuan Dua Hati karya N.H. Dini : Tinjauan Kritik Sastra Feminis* oleh Rury Hasdyanti Hasman (2013). Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bentuk-bentuk dan pengaruh eksistensi wanita terhadap citra seorang anak laki-laki yang hidup di dalam masyarakat. Selain itu, penelitian tersebut berusaha membandingkan antara wanita yang berkarir sebagai seorang guru sekaligus ibu rumah tangga dengan seorang wanita yang hanya hidup sebagai ibu rumah tangga lalu menghubungkannya dengan realitas yang terjadi di dalam masyarakat.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Fachriyani (2011) yang berjudul *Citra Tokoh Perempuan dalam Novel Dorodasih karya Iman Budi Santosa, Relevansinya dengan Perempuan Jawa di Indonesia: Tinjauan Kritik Sastra Feminis*. Dalam penelitian tersebut, Fachriyani berusaha mengungkapkan citra

diri dan citra sosial tokoh perempuan. Tokoh perempuan tersebut antara lain, Dorodasih, Puwanti, dan Dewayanti. Hasil penelitian tersebut menunjukkan sikap para tokoh perempuan yang sangat menginginkan kehidupan mandiri dan terbebas dari kungkungan nilai budaya patriarki serta norma-norma adat budaya tradisional perempuan Jawa. Tokoh perempuan dalam novel tersebut berusaha hidup mandiri yang tidak selalu bergantung pada laki-laki dan berusaha melepaskan diri. Ketiga tokoh perempuan itu dicitrakan sebagai perempuan tangguh dan berkeinginan besar untuk bangkit dari keterpurukan hidup di masa lalu.

Dari sejumlah penelitian di atas dapat dilihat bahwa penelitian-penelitian tersebut lebih menekankan pada pengungkapan citra diri dan citra sosial tokoh perempuan, dalam artian tokoh-tokoh perempuan yang disajikan mulai membebaskan diri dari segala bentuk keterkungkungan baik dari ideologi patriarki maupun dari aturan adat dan tradisi. Adapun penelitian yang membahas mengenai ketidakadilan gender, namun tidak mengkhusus dialami oleh perempuan saja.

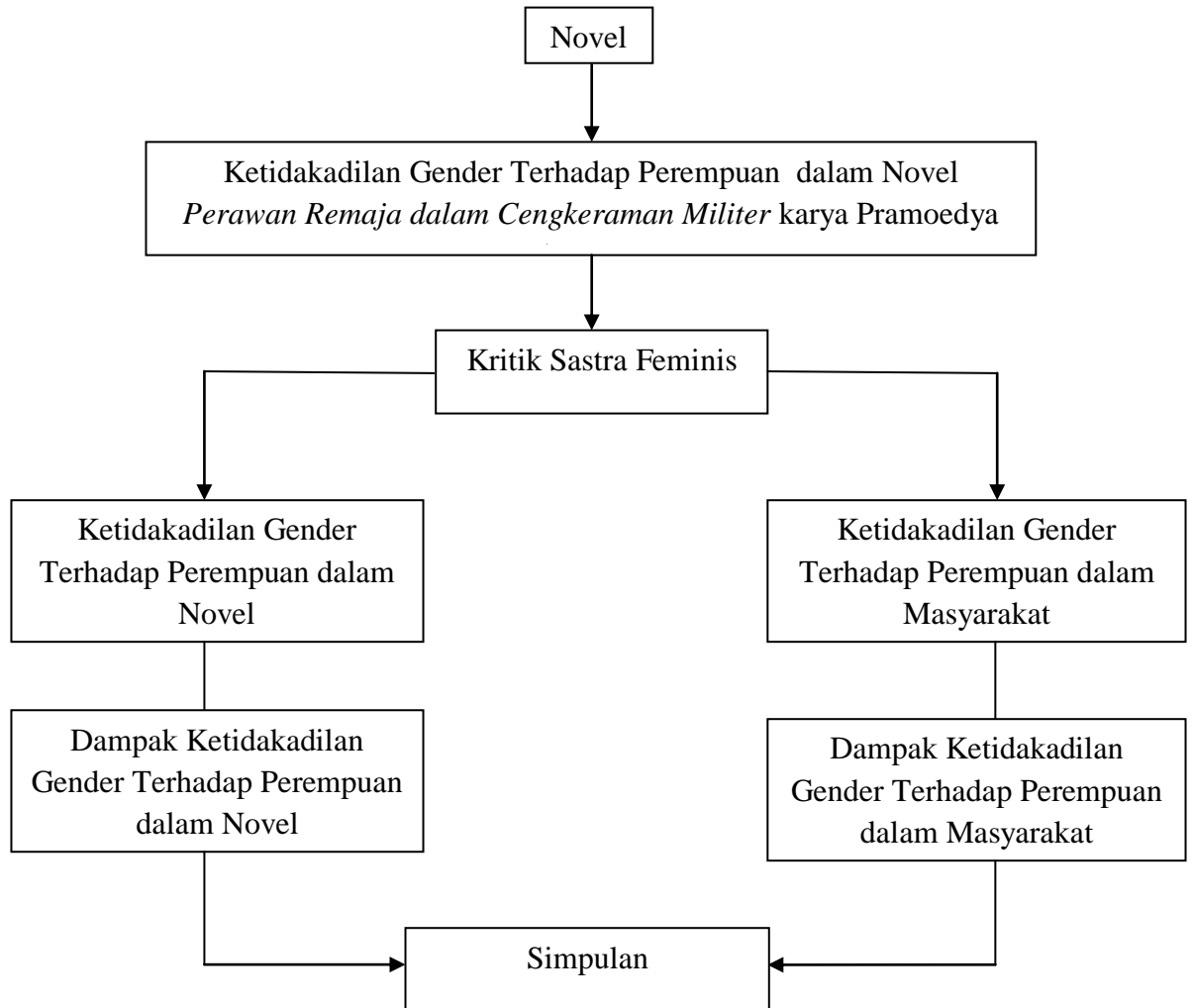
Dengan demikian, sejumlah penelitian tersebut memiliki relevansi dengan analisis terhadap novel *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer* karya Pramoedya Ananta Toer. Hal tersebut dapat dilihat pada fokus analisis yaitu permasalahan perempuan. Namun, penelitian ini lebih mengkhususkan kepada ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan dan dampak dari ketidakadilan gender tersebut. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut

menggunakan alat analisis yang sama dengan penelitian ini yaitu kritik sastra feminis.

### **C. Kerangka Pikir**

Dalam penelitian terhadap novel *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer* karya Pramoedya Ananta Toer. Pendekatan yang digunakan adalah kritik sastra feminis. Kritik sastra feminis sebagai alat analisis untuk mengungkap ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan lalu dihubungkan dengan dampak dari ketidakadilan gender dalam novel tersebut serta kaitannya dengan masyarakat. Kerangka pikir dapat dilihat pada halaman berikutnya.

## BAGAN KERANGKA PIKIR



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu (Suryabrata, 2009:11). Dalam penelitian sastra, penelitian adalah kegiatan menyelidiki, menganalisis, dan memahami karya sastra secara sistematis dengan mendasarkan kepada kerangka teori dan pendekatan ilmiah tertentu. Tujuannya adalah untuk memahami fenomena tertentu yang terdapat dalam karya sastra, termasuk memahami makna karya sastra (Wiyatmi, 2012:5).

Dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan menggunakan metode agar penelitian dapat mencapai sasaran berupa jawaban dari masalah atau kebenaran. Metode merupakan cara-cara, strategi untuk memahami realitas, langkah-langkah yang sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab akibat berikutnya. Metode berfungsi untuk menyederhanakan masalah agar mudah dipahami (Ratna, 2004:34).

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Ratna (2004:47) memberikan perhatian terhadap data alamiah, data dalam hubungannya dengan konteks keberadaannya. Sumber datanya adalah karya, naskah, data penelitiannya, sebagai data formal adalah kata-kata, kalimat, dan wacana.

Menurut Sundari (dalam Zulfaira, 2011) metode kualitatif digunakan untuk menelusuri persoalan dan jalan keluar dari ketidakadilan gender dan khususnya ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Pendekatan yang personal dan kualitatif sifatnya, dianggap paling tepat karena metode ini membolehkan berkembangnya hubungan yang relatif egaliter antara peneliti dan perempuan, non eksploitatif.

Berdasarkan hal tersebut maka, penelitian dimulai dengan mengklasifikasi sejumlah data mengenai ketidakadilan gender yang dialami perempuan dan dampak dari ketidakadilan gender tersebut. Selanjutnya, penemuan data sekunder melalui bahan bacaan seperti, buku-buku, jurnal perempuan, dan situs internet terkait masalah tersebut yang terdapat di dalam masyarakat. Apabila data primer dan data sekunder telah ditemukan dan diklasifikasi maka keduanya disandingkan untuk dianalisis keterkaitannya.

## **B. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan membaca sejumlah buku dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan objek yang akan diteliti. Jenis data yang diproses dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.



## **1. Data Primer**

Data primer bersumber dari novel *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer* karya Pramoedya Ananta Toer. Novel ini diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), cetakan pertama (Maret, 2001) dengan tebal 218 halaman. Proses pengambilan data ini dilakukan dengan mencatat dari novel hal-hal yang terkait masalah ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan ke dalam kartu data menggunakan alat tulis dan mengidentifikasi semua hal terkait dengan ketidakadilan gender yang dialami perempuan dan dampaknya.

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk menunjang data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder ditemukan dari berbagai sumber seperti hasil penelitian, baik berupa skripsi maupun tesis yang membahas mengenai ketidakadilan gender terhadap perempuan, jurnal perempuan, buku-buku sastra, dan teori-teori yang relevan dengan penelitian, data-data dari internet dan buku-buku yang dapat menunjang proses penelitian.

## **C. Instrumen Penelitian**

Untuk memudahkan proses penelitian diperlukan alat dan bahan yang dapat menunjang kelancaran kerja penelitian. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Alat Tulis

Alat tulis terdiri dari pulpen, pensil, dan kertas. Alat-alat tersebut berguna dalam pencatatan data-data yang telah diklasifikasikan dari novel *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer* dan data-data yang diperoleh dari luar objek kajian sebagai bahan rujukan.

2. Kartu Data

Kegunaan dari alat ini untuk mengumpulkan data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang mencatat bagian-bagian teks dan kutipan-kutipan dalam penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang ada.

3. *Laptop*

Alat ini merupakan alat yang sangat dibutuhkan dan berperan penting untuk kelancaran proses penyatuan data dan kerja analisis. Keberadaan alat ini dapat memudahkan dalam penyusunan data agar dapat sistematis dan mudah dipahami.

4. *Flashdisk*

Keberadaan alat ini sangat membantu proses penelitian. Ukurannya yang kecil dan mudah dibawa membantu pengumpulan data yang dilakukan di luar teks novel, misalnya pencarian data atau rujukan dari internet.

#### **D. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

Sebelum pembahasan lebih lanjut mengenai novel *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer* terlebih dahulu akan dijelaskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Hal tersebut dimaksudkan agar mempermudah dalam menyatukan pemahaman dan pengertian mengenai istilah dan masalah yang akan dibahas.

Macdonald,dkk (1999: xii) menyebutkan bahwa dalam khasanah ilmu-ilmu sosial, istilah 'gender' diperkenalkan untuk mengacu kepada perbedaan-perbedaan antara perempuan dengan laki-laki tanpa konotasi-konotasi yang sepenuhnya bersifat biologis. Jadi rumusan 'gender' yang ini merujuk kepada perbedaan-perbedaan antara perempuan dengan laki-laki yang merupakan bentukan sosial; perbedaan-perbedaan yang tetap muncul meskipun tidak disebabkan oleh perbedaan-perbedaan biologis yang menyangkut jenis kelamin.

Sugihastuti dan Sastriyani (2007:72) mengemukakan definisi gender di antaranya;

1. Jenis kelamin,
2. Suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, misalnya bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, centil, emosional atau keibuan, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa, dan
3. Hubungan sosial yang terkonstruksi antara perempuan dan laki-laki yang bervariasi tergantung faktor-faktor budaya, agama, sejarah, dan ekonomi.

Gender merupakan dampak proses dikotomis yang dibuahkan dari peniadaan persamaan dan penekanan berlebih terhadap perbedaan. Jika benar-benar ada perbedaan biologis, kemunculannya ke permukaan terlampau sering dlebih-lebihkan demi melayani kebutuhan akan konstruksi gender (Sugihastuti dan Saptiawan, 2010: 10).

Perbedaan gender menimbulkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender menurut Fakih (2012:12-13) termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yaitu marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.

Marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi berarti semakin miskin dan tersingkirkannya (kaum perempuan) karena tidak mendapat sesuatu, misalnya pekerjaan, contohnya pekerjaan di sawah pada musim panen. Hal ini juga dapat terjadi dalam rumah tangga (diskriminasi), masyarakat, kultur dan negara, serta tafsir keagamaan (Sugihastuti dan Sastriyani, 2007: 146).

Subordinasi merupakan sikap atau tindakan masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibanding laki-laki yang dibangun atas dasar keyakinan satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding yang lain (Suyatno, 2012:7). Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu.

Fakih (2012:16) secara umum mengungkapkan stereotipe merupakan pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Misalnya, penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya. Stereotipe terhadap kaum perempuan ini terjadi di mana-mana. Banyak peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kultur, dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena stereotipe tersebut.

Kekerasan merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, yang pelakunya perseorangan atau lebih, yang dapat mengakibatkan penderitaan bagi pihak lain. Kekerasan tersebut dibedakan dalam dua bentuk, yakni kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan luka pada fisik hingga mengakibatkan kematian, dan kekerasan psikologis yang berakibat pada timbulnya trauma yang berkepanjangan pada korban terhadap hal-hal yang telah dialaminya (Saraswati dalam Sugihastuti dan Saptiawan, 2010: 171). Salah satu jenis kekerasan adalah kekerasan terhadap salah satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.

Bias gender yang mengakibatkan beban kerja seringkali diperkuat dan disebabkan oleh adanya pandangan atau keyakinan di masyarakat bahwa pekerjaan yang dianggap masyarakat sebagai jenis “pekerjaan perempuan”, seperti semua pekerjaan domestik, dianggap dan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis “pekerjaan lelaki”, serta dikategorikan sebagai

“bukan produktif” sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi negara (Fakih, 2012: 21).

Dalam pengungkapan bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan maka, perlu diperhatikan reaksi tokoh perempuan terhadap perlakuan tidak adil yang dialaminya dan memerhatikan tindakan yang dilakukan oleh tokoh laki-laki terhadap tokoh perempuan. Jadi, kata-kata yang diucapkan dari tokoh laki-laki maupun tindakannya begitupun dengan tokoh perempuan dapat mengungkap bentuk ketidakadilan gender yang terjadi dalam novel.

Feminisme menurut Goefe (dalam Sugihastuti 2010:37) adalah teori tentang persamaan antara laki-laki dan wanita di bidang politik, ekonomi, dan sosial; atau kegiatan terorganisasi yang memperjuangkan hak-hak serta kepentingan wanita. Pendekatan feminisme dalam kajian sastra sering dikenal dengan nama kritik sastra feminis. Menurut Djajanegara (2000:15), kritik sastra feminis adalah salah satu kajian karya sastra yang mendasarkan pada pandangan feminisme yang menginginkan adanya keadilan dalam memandang eksistensi perempuan, baik sebagai penulis maupun dalam karya-karya sastranya.

#### **E. Metode Analisis Data**

Data yang telah diperoleh melalui pengumpulan data dianalisis dengan pendekatan yang digunakan yaitu analisis kritik sastra feminis. Data-data yang diambil bersifat kualitatif, yaitu data-data yang mendeskripsikan ketidakadilan

gender terhadap perempuan dan dampaknya serta kaitannya dengan kehidupan sosial dalam masyarakat.

Analisis data-data dilakukan secara sistematis, sesuai dengan rumusan masalah. Dalam menganalisis data-data yang ada maka, tidak lepas dari analisis gender dan memerhatikan penyebab ketidakadilan gender terhadap perempuan dan relevansinya dengan masyarakat serta kaitannya dengan ide-ide feminis.

Dalam menjawab kedua rumusan masalah yang ada, dilakukan dengan menyajikan data-data primer yang telah ditemukan menyangkut ketidakadilan gender dan dampaknya. Setelah itu, dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan teori feminis serta mengungkapkan keterkaitannya dengan kehidupan sosial masyarakat.

## **F. Prosedur Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka, langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Menentukan objek penelitian, yaitu novel *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer* karya Pramoedya Ananta Toer.
2. Membaca dan memahami objek tersebut.
3. Mencatat dan mengidentifikasi sejumlah masalah yang muncul.
4. Menentukan dan memfokuskan masalah yang akan diteliti.
5. Melakukan studi pustaka.
6. Mengumpulkan dan mengolah data.

7. Mengklasifikasi data sesuai dengan masalah.
8. Melakukan analisis dan interpretasi dengan menggunakan kritik sastra feminis.
9. Menyimpulkan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Pada Bab I, menjelaskan mengenai alasan memilih objek kajian novel *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer* kemudian merumuskan masalah yang terdapat dalam novel tersebut dan membatasi masalahnya. Bab II menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan dalam meneliti dan menjawab pertanyaan penelitian serta hasil penelitian yang relevan mengenai penelitian dan kerangka berpikir dalam melakukan penelitian ini. Selanjutnya, Bab III menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Bab IV berisi pembahasan mengenai masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Pada Bab V berisi simpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Setelah melakukan pengamatan dan penelitian terhadap novel *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer*, maka ditemukan masalah mengenai ketidakadilan gender yang dialami perempuan pada masa pendudukan Jepang (1945) dan ketika perempuan pada masa itu menjadi buangan di Pulau Buru (1970).

Adapun ketidakadilan gender yang dialami perempuan pada masa itu di antaranya, stereotipe, subordinasi, marginalisasi, kekerasan, dan beban kerja. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang dialami tokoh perempuan pada masa pendudukan Jepang dan ketika mereka menjadi buangan di Pulau Buru yang masih primitif terjadi pula dalam realitas kehidupan masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh realitas bangsa Indonesia pada tahun 1945 mengalami jajahan oleh Jepang dan realitas masyarakat dalam suatu suku yang masih terbelenggu oleh adat.

Dari ketidakadilan gender yang dialami tokoh-tokoh perempuan dalam novel tersebut, lalu melahirkan berbagai dampak yang sangat merugikan. Dampak-dampak yang muncul disebabkan oleh sikap menyerah yang ditunjukkan para perempuan dalam menghadapi segala bentuk ketidakadilan, namun bagi kaum feminis hal tersebut harus berusaha untuk diperangi dan perempuan harus bangkit untuk melawan. Dampak-dampak tersebut di

antaranya, beban moral, beban psikologis, hancurnya idealisme, kemerosotan peradaban dan kebudayaan, dan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan. Dampak-dampak dari ketidakadilan gender tersebut pun memiliki kaitan dengan yang dialami oleh masyarakat.

## **B. Ketidakadilan Gender yang Dialami Perempuan**

### **1. Stereotipe**

Fakih (2012: 16) menyatakan bahwa secara umum stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Stereotipe menjadikan perempuan terbatas sebab perempuan akan dilabelkan atau dilekatkan dengan sifat dan sikap tertentu seperti tunduk, bodoh, dan lemah. Sedangkan laki-laki adalah orang yang kuat dan cerdas.

Dalam novel tersebut, perempuan digambarkan sebagai makhluk yang lemah dan tidak berdaya. Berikut kutipannya.

“Jepang memilih para perawan remaja yang belum dewasa untuk memenuhi impian seks dari serdadu Jepang pada satu pihak, dan agar tidak mendapat perlawanan dari remaja tidak berdaya itu pada pihak lain”(Toer, 2001:13)

Kutipan di atas jelas menggambarkan bahwa tokoh perempuan ketika Jepang berkuasa dijadikan budak seks karena dianggap sebagai perempuan yang tidak berdaya. Ketidakberdayaan yang dialami oleh para tokoh perempuan disebabkan oleh pengaruh kuat dari penjajahan Jepang. Para orang tua dari tokoh-tokoh perempuan itu tidak dapat melawan perintah

pemerintahan Jepang. Para orang tua pun harus merelakan anak-anaknya yang belum dewasa untuk diberangkatkan ke luar negeri dan dijadikan budak seks.

Ketidakberdayaan yang dialami oleh tokoh perempuan tersebut menjadikan mereka semakin dianggap sebagai makhluk yang lemah. Pelekatan lemah itu merupakan akibat dari keterbatasan yang mereka alami selama masa penjajahan Jepang. Apalagi usia yang belum dewasa, mengesankan bahwa mereka belum mengerti jalan hidup yang mereka jalani. Oleh karena itu, para serdadu Jepang leluasa menjadikan para perawan remaja sebagai budak seks yang tidak dapat melakukan perlawanan apa pun.

Selain itu, para tokoh perempuan dalam novel digambarkan sebagai perempuan yang tunduk dan patuh terhadap perintah para serdadu Jepang. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

“Tak ada yang bisa berbuat lain kecuali menyerah, menerima segala yang harus terjadi, tanpa pelindung, dengan hati pecah, sedih dan pilu. Ancaman dengan kekerasan bukanlah sesuatu yang luar biasa. Wanita Jepang yang ada di situ sebagai ibu asrama selalu memberikan hiburan kepada mereka agar tetap dapat melakukan “pekerjaan” dengan baik” (Toer, 2001:39)

Penggambaran para tokoh perempuan atau remaja yang tunduk dan patuh terhadap perintah para serdadu Jepang dapat dilihat dari sikap pasrah dan menyerah para perempuan tersebut. Bahkan ancaman kekerasan pun bukanlah sesuatu yang luar biasa bagi mereka. Para tokoh perempuan itu dengan segala keterbatasannya hanya dapat menerima segala hal yang telah terjadi. Pelekatan sikap tunduk dan patuh bagi para tokoh perempuan disebabkan oleh aturan-aturan yang mengikat mereka dalam keadaan terpaksa. Keadaan terpaksa yang

mereka alami menjadi bukti ketakutan dan kelemahan para tokoh perempuan tersebut sehingga melanggengkan ketidakadilan gender.

Perasaan takut akan ancaman para serdadu Jepang semakin menjadikan para tokoh perempuan sebagai makhluk yang tidak berdaya, tunduk, dan patuh. Seperti yang digambarkan ketika tokoh Wanita Jepang yang berprofesi sebagai ibu asrama selalu memberikan hiburan kepada para tokoh perempuan agar dapat melakukan “pekerjaan” dengan baik. Pekerjaan tersebut diartikan sebagai pelayanan seks kepada serdadu Jepang.

Para tokoh perempuan atau para remaja pada masa pendudukan Jepang tersebut secara eksplisit digambarkan pula sebagai perempuan yang bodoh. Bodoh dalam artian para perempuan tersebut percaya begitu saja dengan janji-janji manis yang diutarakan oleh Pemerintah Pendudukan Balatentara Dai Nippon. Berikut contoh kutipannya.

“...bahwa *pertama*, janji menyekolahkan ke Tokyo dan Shonanto oleh Pemerintah Pendudukan Balatentara Dai Nippon, yang tidak pernah diumumkan dengan resmi, terutama tidak pernah tercantum dalam *Osamu Serei* (Lembaran Negara), adalah suatu kesengajaan untuk menghilangkan jejak perbuatan agar orang tak mudah menjejak kejahatannya.” (Toer, 2001:13)

Kutipan di atas menggambarkan bahwa janji-janji manis pemerintahan Jepang itu tidak pernah diumumkan secara resmi. Hal itu dilakukan agar jejak kejahatan terhadap para tokoh perempuan atau remaja yang masih perawan tidak pernah diketahui. Janji-janji itulah yang membuat para remaja tertarik dan terpikat apalagi dengan suatu tujuan mulia mereka untuk berbakti kepada masyarakat dan bangsanya, seperti terlihat dalam kutipan berikut ini.

“gadis-gadis yang hatinya penuh berisikan cita-cita mulia untuk maju dan berbakti pada masyarakat dan bangsanya, bila tidak mengindahkan kenyataan yang berlaku, akan lebih mudah terpicat” (Toer, 2001: 8)

Pelekatan atau pelabelan bodoh yang dialami oleh para tokoh perempuan merupakan bentuk ketidakadilan gender yang disebabkan oleh pendidikan yang kurang bagi perempuan. Sebagian besar perempuan pada masa pendudukan Jepang tidak mengenyam pendidikan atau sebagian besar hanya lulus SD. Maka dengan adanya janji-janji yang diucapkan oleh pemerintah Jepang kepada para tokoh perempuan itu, membuat mereka bersedia apalagi dengan adanya kerelaan dari orang tua mereka yang takut akan hukuman apabila menolak keinginan pemerintah Jepang.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa usia para tokoh perempuan yang belum dewasa melahirkan pelabelan negatif seperti perempuan yang lemah. Usia yang berkisar antara 13-17 tahun merupakan usia yang mudah diiming-imingi oleh janji manis. Keinginan yang kuat dan ambisi yang besar untuk negerinya tidak diimbangi dengan pendidikan yang dimiliki. Mereka pun dengan mudah dicap sebagai perempuan yang bodoh. Mereka belum memahami jalan hidup yang ada di depan mereka. Seperti yang dijelaskan dalam kutipan berikut:

“...di dalam usaha mempersiapkan rakyat Indonesia ke arah kemerdekaan nanti sesuai dengan kehendak Nippon, generasi muda Indonesia dididik supaya bisa mengabdikan diri dalam kemerdekaan. Sumiyati mendengar janji itu pada 1944, bukan 1943. Di tempat lain janji itu berbunyi akan memberikan kesempatan belajar sebagai bidan. Di tempat lain lagi, sebagai jururawat. Tidak mengherankan, karena yang dikehendaki adalah

para perawan remaja yang berumur antara 13-17 tahun, sebagian besar baru lulus SD.” (Toer, 2001: 8)

Kutipan di atas secara eksplisit menggambarkan salah seorang tokoh perempuan yang mendengar kesempatan belajar dari Jepang. Tokoh Sumiyati mendengar janji yang meragukan tersebut namun tetap mengikuti karena rasa takut yang ia miliki. Hal tersebut semakin memperjelas anggapan bahwa tokoh-tokoh perempuan itu sebagai makhluk yang bodoh. Mereka tidak berusaha untuk menolak segala bentuk ancaman karena ketidakberdayaan yang dialami. Selain itu, adanya beban moral yang harus ditanggung dari putusan kedua orang tuanya yang tunduk dan patuh terhadap pemerintah Jepang.

Tidak hanya itu, tokoh-tokoh perempuan usai melayani nafsu bejat para serdadu Jepang tidak mendapat upah atau gaji. Padahal yang mereka lakukan adalah “pekerjaan” meskipun dalam bentuk pemenuhan nafsu para serdadu Jepang. Berikut kutipannya.

“Apakah mereka tak mendapat upah dari Jepang? Tidak! Hanya kadang menerima uang rekreasi pada hari-hari tertentu, waktu mereka diijinkan pesiar melihat-lihat kota dan makan sekedarnya di luar asrama” (Toer, 2001:39)

Hal tersebut semakin memperjelas sikap para serdadu Jepang dalam melanggengkan ketidakadilan terhadap para tokoh perempuan. Lemah, tidak berdaya, bodoh dan tunduk menjadi jalan mulus bagi mereka untuk melumpuhkan perlawanan para tokoh perempuan dan leluasa bersikap sewenang-wenang.

Selain pada masa pendudukan Jepang, pelekatan para tokoh perempuan sebagai makhluk yang lemah, tidak berdaya dan patuh atau tunduk tergambar pula ketika mereka menjadi buangan di Pulau Buru. Seperti yang tersirat pada kutipan berikut:

“Wanita-wanita buangan itu berada di tengah-tengah mereka, dikawal oleh para suami yang membawa parang dan tombak mengawasi mereka dari darat. Pada kesempatan seperti itu tidak mungkin mendekati atau menegur. Terutama bila wanita buangan itu istri “orang gunung” yang masih terkenal buas. Maka lebih baik tak ada percakapan atau teguran. Baik para wanita buangan lama atau pun para buangan baru seakan sudah sama-sama mengerti” (Toer, 2001: 59)

Adanya kalimat yang berbunyi “[...] dikawal oleh para suami yang membawa parang dan tombak mengawasi mereka dari darat” mengisyaratkan bahwa para tokoh perempuan yang hidup di lingkungan suku Alfuru mendapat pengawalan yang ketat oleh para suaminya. Hal tersebut mendukung penandaan terhadap tokoh perempuan sebagai makhluk yang tidak berdaya.

“Maka lebih baik tak ada percakapan atau teguran. Baik para wanita buangan lama atau pun para buangan baru seakan sudah sama-sama mengerti”, kalimat tersebut mempertegas sikap lemahnya para tokoh perempuan. Mereka sudah mengerti satu sama lain dengan segala bentuk pengawasan yang dialaminya. Dari kalimat itu pula dapat dilihat sikap pasrah yang mereka tunjukkan membuat para suami bersikap sewenang-wenang.

Lebih kuatnya tokoh laki-laki daripada tokoh perempuan merupakan bukti bahwa tokoh perempuan setelah menjadi budak seks lalu dibuang di Pulau Buru adalah makhluk yang lemah, tunduk, patuh, dan bodoh. Hal itu

disebabkan oleh tradisi yang dianut di Pulau Buru begitu kental. Tokoh perempuan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya selalu mendapat pengawalan dan dilarang berinteraksi dengan orang lain terutama menggunakan bahasa lain selain bahasa Buru. Apabila hal itu dilanggar, mereka telah melanggar *pamali* dan akan mendapatkan hukuman. Hal itulah yang menjadikan tokoh perempuan tunduk, lemah, patuh, bodoh, dan tidak berdaya. Ketidakadilan gender berupa stereotipe pun mereka alami baik pada masa pendudukan Jepang maupun ketika mereka menjadi buangan di Pulau Buru.

Sesungguhnya kejahatan yang dilakukan oleh serdadu Jepang dan para suami ketika tokoh-tokoh perempuan tersebut menjadi buangan di Pulau Buru menghasilkan ketidakadilan gender seperti stereotipe. Jika tokoh perempuan dalam novel tersebut dianggap lemah, tidak berdaya, bodoh dan tunduk, justru tokoh laki-laki dianggap sebagai makhluk yang cerdas dan kuat. Tokoh laki-laki yang dimaksudkan di sini adalah para serdadu Jepang dan para suami. Pelekatan cerdas dan kuat para serdadu Jepang tersebut dapat dilihat pada janji mereka untuk menyekolahkan para perempuan Indonesia ke Tokyo dan Shonanto yang tidak pernah diumumkan secara resmi, dan justru merupakan unsur kesengajaan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Kecerdasan mereka dapat dilihat dari kecerdikannya dalam menghilangkan jejak-jejak kejahatan yang dilakukan. Mereka juga dengan mudahnya mengelabui para tokoh perempuan yang percaya begitu saja dengan janji-janji manis yang



diutarakannya. Hal tersebut memperkuat penandaan bagi mereka sebagai makhluk yang cerdas.

Tidak hanya cerdas, para serdadu Jepang tersebut merupakan laki-laki yang kuat. Hal tersebut tergambar jelas pada kutipan berikut:

“Di Kisar, Flores. Ibu menangis terus. Badan sakit-sakit dan Jepang terus rusak badan Ibu. Coba pikir, Ibu masih kecil. Tapi, oh, itu Atacuka *san* besar dan kuat” (Toer, 2001:71).

Dari ungkapan yang dilakukan oleh salah seorang tokoh perempuan yaitu S. F. jelas menggambarkan bahwa para serdadu Jepang tersebut kuat. Berkat kekuatannya itu, para serdadu Jepang leluasa bertindak sewenang-wenang terhadap perempuan Indonesia, termasuk dengan kekerasan-kekerasan yang dilakukan. Kuatnya para serdadu Jepang tersebut disebabkan oleh tidak adanya perlawanan yang dilakukan oleh para tokoh perempuan.

Ketika para tokoh perempuan tersebut menjadi buangan di Pulau Buru tahun 1970-an, mereka kembali berhadapan dengan tokoh laki-laki dari suku Alfuru yang masih primitif. Sikap primitif para tokoh lelaki suku Alfuru itu menandakan bahwa mereka makhluk yang kuat dan keinginan mereka harus dituruti. Berikut kutipan yang menggambarkan hal tersebut.

“Orang punya harta Polli; di Wai Apu ini orang bisa bawa perempuan mana saja asal ada harta. Perempuan itu harta, mesti turut lelaki punya mau. Kalau tidak, ...oh.” (Toer, 2001: 100)

Kutipan di atas menggambarkan dialog antara tokoh Sarony dengan tokoh Siti F. Dari perbincangan yang diucapkan oleh tokoh Siti F. tersebut dapat dilihat penggambaran para tokoh lelaki suku Alfuru dapat membawa perempuan mana saja dengan harta mereka. Jika perempuan dianggap sebagai

harta, maka perempuan harus mengikuti keinginan para tokoh lelaki tersebut. Apabila keinginan para lelaki itu tidak dituruti, maka hal-hal yang semakin tidak menguntungkan diri para tokoh perempuan tersebut dapat terjadi. Apalagi didukung oleh keadaan tokoh perempuan yang harus patuh terhadap tradisi yang ada di Pulau Buru sehingga diposisikan sebagai makhluk yang lemah.

Selain itu, salah seorang tokoh lelaki suku Alfuru dalam novel digambarkan sebagai seorang jawara yang ditakuti. Adanya ketakutan masyarakat terhadap seorang tokoh yang bernama Mate Temon Latun, semakin mempertegas penandaan makhluk kuat pada tokoh lelaki tersebut. Di bawah ini kutipannya.

“Mate Temon Latun, demikian diceritakan oleh penduduk, adalah seorang jawara yang ditakuti di kampung-kampung hilir. Diceritakan juga bahwa kejawaannya telah dihiasinya dengan enam orang istri, sebagian adalah istri rampasan”(Toer, 2001: 103)

Dianggap kuatnya tokoh Mate Temon Latun tersebut, sehingga ia dapat memiliki enam orang istri. Bahkan sebagian dari istri yang ia miliki merupakan hasil rampasannya. Dianggap kuatnya tokoh Mate Lemon Latun tersebut merupakan akibat dari tradisi yang ada di suku Alfuru Pulau Buru terutama dalam anggapan perempuan sebagai harta. Adanya kepercayaan laki-laki Alfuru yang seperti itu semakin melemahkan posisi tokoh perempuan dan tokoh laki-laki semakin sewenang-wenang dalam memosisikan perempuan.

Hal tersebut membuktikan bahwa kedudukan para tokoh serdadu Jepang sebagai penjajah dan para tokoh lelaki suku Alfuru sebagai para suami tokoh-tokoh perempuan tersebut turut mendukung pelabelan cerdas dan kuat bagi

laki-laki. Sebaliknya, perempuan distereotipekan sebagai makhluk yang lemah, bodoh, tidak berdaya, dan tunduk atau patuh.

Segala bentuk pelabelan negatif yang dialami tokoh perempuan dalam novel tersebut terdapat pula pada realitas masyarakat khususnya pada masa pendudukan Jepang. Salah satu realitas yang dialami oleh orang Indonesia bahwa sesungguhnya perempuan Indonesia pada masa itu memang mengalami ketidakadilan oleh Jepang.

Realitas bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang bahwa para perempuan yang bertugas menghibur serdadu Jepang diberi nama *jugun ianfu*. Di masa kolonial penjajahan Jepang, kaum perempuan Indonesia sungguh tersiksa jiwa dan raganya. Sebagian kaum wanita Indonesia diperlakukan tidak wajar oleh para serdadu kekaisaran kerajaan Jepang pada masa penjajahannya di Indonesia yaitu di tahun 1942 hingga 1945 (Adhidarta, 2011).

Mereka direkrut dengan cara halus seperti dijanjikan sekolah gratis, pekerjaan sebagai pemain sandiwara, pekerja rumah tangga, pelayan rumah yang disertai tindak kekerasan, menculik bahkan memerkosa di depan keluarga. Hal itu membuktikan bahwa pada masa Jepang menduduki Indonesia, perempuan Indonesia sudah dianggap lemah karena mereka tertekan dan harus patuh terhadap perintah serdadu Jepang daripada harus menerima ancaman hukuman dari penjajah tersebut.

Galih seorang mahasiswa Ilmu Sejarah di Surakarta mengungkapkan bahwa sebagian dari perempuan *jugun ianfu* sekarang memang sudah berusia senja, tetapi peristiwa itu masih tetap diingat sepanjang hayat. Salah satunya,

Wainem, perempuan kelahiran Karanganyar 1925 ini, masih ingat ketika harus dipaksa melayani para serdadu Jepang, dan setelah itu ditinggal begitu saja. Menurutnya, ketika masih menjadi *jugun ianfu*, setiap hari ia diperiksa oleh dokter Jawa, tetapi dimandori oleh dokter Belanda. Perempuan yang ketahuan hamil dipulangkan bahkan disuruh untuk menggugurkan kandungannya.

Fakta sosial di atas secara eksplisit menggambarkan sosok perempuan-perempuan yang dianggap lemah, tidak berdaya, bodoh dan tunduk atas segala perintah para serdadu Jepang. Adanya *jugun ianfu* semakin memperjelas bahwa perempuan Indonesia pada masa pendudukan Jepang dianggap sebagai perempuan yang tidak bisa melawan, tidak punya daya dan begitu mudah untuk dibodohi. Hal tersebut terjadi karena tekanan penjajahan yang begitu kuat dan tidak adanya kesempatan untuk melawan sehingga melahirkan kepasrahan dan berujung pada stereotipe yang merugikan.

Selain pada masa penjajahan Jepang, pelabelan negatif bagi kaum perempuan terjadi pula di salah satu suku di Indonesia yaitu suku Asmat. Fakta sosial yang terjadi bahwa perempuan Asmat mengalami penderitaan. Seperti pada kutipan artikel di bawah ini.

“Sebagai seorang istri, perempuan Asmat harus menyediakan segala hal untuk suami. Jika istri tidak menyiapkan permintaan suaminya seperti sagu atau ikan maka, istri akan menjadi korban luapan kemarahan. Jika mereka kalah judi, maka istri pula yang akan dijadikan objek kekesalan” ([www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com))

Fakta sosial di atas menggambarkan perempuan suku Asmat yang tunduk atau patuh terhadap suaminya. Mereka harus menuruti keinginan suaminya agar tidak menjadi korban luapan amarah. Artikel di atas menegaskan pula

sikap pasrah yang dilakukan perempuan Asmat sehingga penandaan perempuan lemah dan tidak berdaya semakin tegas disandangnya. Kenyataan yang ada bahwa posisi laki-laki suku Asmat lebih tinggi dibandingkan dengan posisi perempuan. Hal tersebut sudah menjadi adat atau tradisi dalam suku tersebut.

Begitu pula yang dialami perempuan di Jayapura. Para suami bebas melakukan hal yang diinginkannya kepada sang istri karena menganggap mereka sudah membayar mas kawin. Seperti yang tergambar dalam artikel di bawah ini.

“ketika masuk ke sana, adat juga harus menyesuaikan, bahwa tidak boleh mengintervensi. Memang barang ini sesuatu yang baru, ya, jadi dia masih berbenturan antara new democracy dengan adat. Selama ini bahwa laki-laki bilang dia sudah bayar mas kawin jadi bebas perlakuan dan ini memerlukan learning process yang kita semua harus lakukan, ungapnya” (Lita, PortalKBR: 25/9/20113).

Secara implisit, artikel di atas mengungkapkan bentuk kekuasaan para lelaki di Jayapura terhadap istrinya. Mas kawin menjadi alasan bagi para lelaki Jayapura bertindak sewenang-wenang terhadap istrinya. Adanya mas kawin sebagai tradisi menjadi salah satu syarat dalam pernikahan menjadikan perempuan semakin dilabelkan lemah dan tidak berdaya. Tradisi tersebut akan mempersempit ruang gerak perempuan. Laki-laki akan menganggap dirinya memunyai kekuasaan yang lebih tinggi sehingga perempuan harus patuh dan tunduk kepada suami karena telah dibayar dengan mas kawin tersebut. Hal itulah yang membuat perempuan berada dalam posisi yang lemah.

Kelemahan-kelemahan yang dialami oleh para perempuan tersebut melahirkan berbagai masalah seperti yang tertuang dalam lanjutan artikel yang ditulis oleh Katharina dalam PortalKBR bahwa setiap tahunnya, kasus KDRT di Bumi Cendrawasih terus meningkat. Dalam proses pelaporannya ke polisi, kebanyakan istri melaporkan kasus KDRT. Namun, di tengah jalan pelaporannya dicabut kembali karena berbentur adat istiadat setempat. Di mana jika laki-laki sudah membayar mas kawin kepada sang istri, maka tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sang suami dianggap benar.

Fakta sosial seperti yang tergambar di atas, semakin menyudutkan kaum perempuan ke dalam posisi lemah dan tidak berdaya. Kaum lelaki semakin merasa kuat dan pintar karena didukung oleh peraturan adat yang memenangkan kaum lelaki. Selain itu, hal tersebut akan melanggengkan budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat khususnya kehidupan keluarga.

Seperti yang disebutkan oleh Wahyuni (dalam Sugihastuti dan Suharto, 2010: 218-219) bahwa karena posisi subordinat perempuan, laki-laki cenderung memperlakukan perempuan (istri) sebagai benda yang dimilikinya, layaknya benda-benda yang lain. Istri dianggap sebagai barang, maka suami dapat berbuat sewenang-wenang terhadap istri, sedangkan istri seolah-olah tidak mempunyai hak untuk melawan tindakan suami, termasuk suami untuk kawin lagi karena hal itu dianggap wajar.

Berdasarkan fakta imajiner yang ada dalam novel PRCM dan fakta sosial yang ada dalam masyarakat dapat disimpulkan bahwa salah satu bentuk ketidakadilan gender yaitu stereotipe atau pelabelan negatif dialami oleh para

perempuan yang hidup pada masa pendudukan Jepang dan perempuan yang hidup di bawah kungkungan adat. Hal tersebut tentunya sejalan dengan gagasan feminisme sosialis yang berasumsi bahwa konstruksi sosial sebagai sumber ketidakadilan terhadap perempuan. Termasuk di dalamnya adalah stereotipe-stereotipe yang dilekatkan pada perempuan (Sugihastuti dan Saptiawan, 2010:98). Dengan kata lain, adanya pelekatan-pelekatan negatif terhadap perempuan itu disebabkan karena anggapan akibat konstruksi sosial terhadap perbedaan biologis.

Stereotipe-stereotipe yang dilekatkan pengarang terhadap tokoh perempuan dalam novel PRCM tersebut menunjukkan bahwa pengarang secara eksplisit maupun implisit ingin menampilkan kepada pembaca bahwa perempuan khususnya pada masa pendudukan Jepang mengalami ketidakadilan. Pelekatan lemah, bodoh, tunduk, dan tidak berdaya kepada perempuan ditampilkan pengarang sebagai akibat dari kurangnya pendidikan bagi perempuan serta pengaruh dari tekanan-tekanan penjajahan.

Hal yang sama terjadi pula ketika menjadi korban buangan di Pulau Buru. Perempuan tidak lepas dari pelabelan atau penandaan terhadap dirinya karena belenggu aturan adat yang sangat merugikan dan membuat mereka selalu berada pada posisi subordinat. Posisi itu melanggengkan bentuk ketidakadilan bagi tokoh perempuan dan laki-laki beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi berada pada diri mereka.

Dalam realitas masyarakat sendiri seperti pada beberapa artikel sebelumnya menunjukkan bahwa perempuan dengan pelabelan negatif yang

disandangnya semakin melemahkan dirinya. Belum ada bentuk perlawanan yang secara signifikan membawa posisi mereka ke arah yang lebih baik.

Dari berbagai permasalahan di atas maka, tokoh-tokoh perempuan digambarkan sebagai perempuan yang belum keluar dari struktur dan sistem yang tidak adil tersebut. Dengan kata lain, belum ada tokoh perempuan yang mencoba keluar dari konstruksi sosial yang menimbulkan ketidakadilan tersebut seperti halnya yang diusung oleh feminisme sosialis.

Bagi feminisme sosialis, ketidakadilan yang dialami perempuan berasal dari faktor supremasi laki-laki yang didukung oleh stereotipe-stereotipe tidak menguntungkan perempuan. Perempuan tertindas di semua kelas, bahkan dalam lingkungan keluarga. Jika seorang istri dimiliki oleh suami, maka hal tersebut merupakan bentuk penindasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, perempuan dianggap inferior, sebagai budak yang tidak mempunyai kekuasaan apa-apa dalam institusi keluarga (Megawangi, 1999:131-132).

Fakta imajiner dan fakta sosial mengenai perempuan menghasilkan sebuah simpulan bahwa ketidakadilan gender dalam hal ini stereotipe-stereotipe yang disandangnya membuktikan ketakutan mereka untuk keluar dari ketertindasan yang dialaminya. Hal tersebut disebabkan oleh kekuasaan laki-laki baik berupa faktor penjajahan maupun tradisi dan terkungkungnya perempuan dalam ranah domestik yang turut andil melanggengkan ketidakadilan. Padahal bagi feminisme sosialis, perempuan harus melangkah ke ranah publik untuk membebaskan dirinya dari ketidakadilan. Meskipun ketidakadilan belum tentu terhapus begitu saja. Perempuan harus memerangi konstruksi visi dan ideologi



masyarakat terutama stereotipe yang tidak menguntungkan tersebut. Perempuan harus mampu bersaing dan mendapat penghargaan layak dan setara dengan laki-laki.

## **2. Kekerasan**

Menurut Saraswati (dalam Sugihastuti dan Saptiawan, 2010:171) kekerasan merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, yang pelakunya perseorangan atau lebih, yang dapat mengakibatkan penderitaan bagi pihak lain. Kekerasan tersebut dibedakan dalam dua bentuk, yakni kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan luka pada fisik hingga mengakibatkan kematian, dan kekerasan psikologis yang berakibat pada timbulnya trauma berkepanjangan pada korban terhadap hal-hal tertentu yang telah dialaminya.

Dalam novel PRCM, tokoh-tokoh perempuan digambarkan mengalami tindak kekerasan baik pada masa pendudukan Jepang maupun ketika perempuan tersebut menjadi buangan di Pulau Buru. Berikut kutipannya.

“Airmata Sumiyati mulai bercucuran waktu kisah hidupnya sampai pada suatu bagian kala asramanya, dengan 50 gadis dari Jawa, didatangi oleh sejumlah besar serdadu Jepang dan menggilir mereka gelombang demi gelombang. Setiap gadis mendapat satu bilik. Serdadu Nippon yang berhajad seks datang ke kamar yang ditentukan pada karcis berisikan nomor bilik. Mereka yang belum dapat giliran harus menunggu sampai yang di dalam keluar” (Toer, 2001:39)

Kutipan di atas secara eksplisit menggambarkan kehidupan tokoh perempuan dalam menghadapi tindak kekerasan seksual dari serdadu Jepang.

Para tokoh perempuan tersebut layaknya orang yang sedang menunggu antrian untuk melayani nafsu bejat para serdadu Jepang. Hal tersebut merupakan kekerasan fisik yang berupa kekerasan seksual bahkan dapat berdampak pada kejiwaan perempuan. Tokoh perempuan dengan kekerasan yang dialami merupakan bentuk kelemahan yang disebabkan oleh tekanan dari para serdadu Jepang.

Kekerasan yang dialami tokoh perempuan pun terjadi ketika mereka menjadi korban buangan. Para suami mereka bertindak kasar terhadap istrinya dengan melakukan pemukulan. Hal tersebut secara eksplisit tergambar dalam kutipan berikut:

“ Kau pukul dia sampai hampir mati. Kau hajar dia seperti babi. Apa kesalahannya? Kan dia istrimu sendiri?” (Toer, 2001:202)

Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh para tokoh perempuan disebabkan oleh kekuasaan tertinggi di Pulau Buru berada di tangan laki-laki. Apalagi dengan tradisi dan aturan yang mengungkung perempuan, seperti perempuan harus tunduk dan patuh kepada suami semakin memberi kesempatan adanya kekerasan bagi para tokoh perempuan yang biasanya berujung pada kematian seperti yang digambarkan pada kutipan di atas.

Dalam novel tersebut digambarkan pula secara gamblang melalui tokoh perempuan kekerasan fisik yang dialami. Berikut contoh kutipannya.

“Di kapal sudah banyak teman dari tempat-tempat lain. Sahaya tidak sempat berkenalan dengan mereka, karena begitu sahaya naik terus disambut oleh Jepang dari Kendal tadi. Ia tertawa dan dengan lancang menggerayangi tubuh sahaya. Mulutnya berkamat-kamat menggumamkan ‘nona cantik’ dan lain-lain. Kemudian dipondongnya sahaya, diciumi. Sahaya menjerit-jerit ketakutan.

Jepang gundul itu tidak tertegun karena jeritan sahaya” (Toer, 2001: 62)

“Tak ada orang menolong sahaya. Sahaya dibawa masuk ke dalam kamar kapal. Pelangi itu juga yang jadi penutup muka sahaya. Ia gelatakan sahaya... dan waktu terbangun seluruh badan lemas, pakaian rusak semua... badan sakit semua. Ya, Nak, terang-terangan saja, Ibu sudah tua sekarang, apa pula guna malu. Sipena (kemaluan ini) bengkok. Sahaya menangis. Tapi tiap sahaya menangis dia malah datang lagi dan diulangnya perbuatannya... dan sahaya pingsan lagi. Begitu seterusnya sampai sahaya tidak dapat menangis lagi” (Toer, 2001: 62)

Kutipan di atas jelas menggambarkan kekerasan fisik tokoh yang bernama Kartini. Para tentara atau serdadu Jepang itu leluasa menggerayangi tubuhnya. Meski ia menangis, namun para serdadu Jepang itu tidak menggubris dan semakin melampiaskan nafsunya kepada tokoh Kartini dan perempuan-perempuan yang lainnya. Bahkan, tokoh Kartini secara terang-terangan mengungkapkan bahwa badannya sakit dan lemas serta kemaluannya bengkok akibat perilaku tidak manusiawi dari para serdadu Jepang tersebut.

Kekerasan fisik terjadi sebagai akibat dari kerelaan para tokoh perempuan dijadikan sebagai budak seks. Terlebih watak para tokoh serdadu Jepang yang biadab tersebut mendukung tindak kekerasan fisik yang dialami oleh para tokoh perempuan. Posisi lemah, tidak berdaya, patuh, dan tunduk yang dialami oleh para tokoh perempuan merupakan faktor yang melanggengkan kekerasan yang terjadi.

Kekerasan fisik seperti itu berujung pada dampak kekerasan psikologis yaitu trauma yang berkepanjangan. Hal itu dapat dilihat dari perkataan tokoh Kartini yang mengatakan ‘begitu seterusnya sampai sahaya tidak dapat

menangis lagi?. Dengan kata lain, ketidakmampuannya menangis merupakan wujud trauma yang dialami oleh tokoh Kartini. Rasa malu pun tidak dimilikinya lagi. Tokoh Kartini dengan segala usahanya untuk lepas dari jeratan tindak kekerasan tersebut pun kemungkinannya kecil apalagi tidak ada yang bisa menolongnya.

Kondisi para tokoh perempuan pada masa itu yang belum dewasa, semakin melancarkan aksi para serdadu Jepang untuk memenuhi kebutuhan seksnya. Kondisi fisik sebagai perempuan yang masih remaja pada masa tersebut telah rusak akibat pemenuhan seks yang tidak manusiawi untuk para serdadu Jepang. Kekerasan-kekerasan yang dialami tokoh perempuan itu tidak dapat melepaskan jerit penderitaan baru bagi perempuan. Para perempuan lalu mengidap berbagai macam penyakit. Kutipan berikut ini menunjukkannya.

“Wanita yang dipaksa untuk cepat dewasa itu telah melayani suaminya sejak berumur tidak lebih dari 10 tahun. Sekarang ia sakit kronis. Heparnya telah membengkak, yang membikin perutnya jadi buncit. Gejala penyakit kuning nampak nyata. Penyakit yang dideritanya adalah yang menuntut banyak kematian” (Toer, 2001: 199)

Adanya penyakit-penyakit yang diderita oleh tokoh perempuan tentunya disebabkan karena usia perempuan yang dijadikan sebagai budak seks masih begitu remaja. Para tokoh perempuan pun mengalami sakit kronis. Kondisi yang seperti itulah mengundang kekerasan psikologis atau trauma yang berkepanjangan bagi para tokoh perempuan.

Kekerasan psikologis yang dialami oleh para tokoh perempuan dalam novel tersebut dapat dilihat dari beberapa kutipan berikut.

“Kalau sampean nanti pulang, tolong ajak saya, bawa saya ini. Saya akan sangat berterima kasih kalau sampean bisa bawa saya keluar dari daerah ini. Saya sudah cukup lama disiksa oleh keadaan, sementara saya tidak tahu jalan keluar” (Toer, 2001:50)

“Mereka menjadi tawanan lingkungan hidup sendiri. Syarat hidup yang terlalu berat menyebabkan mereka cepat tua. Dapat diduga, sebagian besar dari mereka telah mati, terutama karena tidak adanya pengobatan dan seringnya wabah serta penyakit parasit, yang menjadi ciri setiap masyarakat terasing dan terbelakang, mengamuk” (Toer, 2001:66)

Posisi tokoh perempuan sebagai buangan di Pulau Buru tak melepaskan mereka dari kekerasan psikologis. Suku Alfuru yang masih primitif membuat tokoh perempuan tersebut setelah trauma dengan kekerasan seksual yang dialami semakin trauma dengan kehidupan adat dan tradisi suku Alfuru. Kalimat yang mengatakan ‘saya sudah cukup lama menderita’ memperjelas bentuk trauma dari para perempuan tersebut. Tidak hanya itu tidak adanya pengobatan yang mereka dapatkan, menjadikan mereka semakin asing dan terbelakang. Kekerasan psikologis seperti itu membuat tokoh perempuan bersikap pasrah terhadap kehidupan yang dijalaninya.

Hal serupa terjadi pula dalam kehidupan masyarakat. Adanya *jugun ianfu* seperti yang telah dibahas sebelumnya menjadi bukti kekerasan fisik yang dialami perempuan Indonesia ketika masa pendudukan Jepang. Mereka harus memenuhi nafsu bejat para serdadu Jepang yang memperlakukannya dengan sangat kasar, beringas dan tidak manusiawi.

Selain kekerasan fisik, secara otomatis kekerasan psikologis dialami pula perempuan Indonesia pada masa itu. Seperti yang dialami Wainem pada pembahasan sebelumnya yang tidak bisa melupakan kejadian yang dialami.

Apalagi ketika ia disuruh untuk menggugurkan kandungannya. Selain Wainem, para *jugun ianfu* yang lainnya terkadang menutup diri dari segala pertanyaan tentang kehidupan masa lalunya itu. Hal itu disebabkan karena trauma yang mendalam dari kejadian yang dialaminya.

Salah seorang lagi mantan *jugun ianfu* yang bernama Mimin mengungkapkan bahwa sikap para tentara yang haus seksual bersikap sangat kasar bahkan tak jarang melakukan beragam penyiksaan. Peristiwa itu masih terekam secara kuat dalam ingatan-ingatan masa tua Mimin. Semuanya ditempatkan begitu saja tanpa adanya penempatan ruangan khusus dan layak bagi mereka. Para perempuan yang berada di dalam gedung itu mengalami penderitaan fisik maupun psikis. Mereka mengalami eksploitasi secara brutal dan diperlakukan secara tidak manusiawi (Mariana, Etnohistori: Juli 2012).

Tindakan kekerasan pun terjadi pada lingkungan suku Asmat di mana para suami rentan melakukan kekerasan terhadap istrinya. Hal tersebut disebabkan oleh prinsip pernikahan yang menyatakan bahwa proses ini berlaku bagi seorang laki-laki maupun perempuan yang berusia 17 tahun dan dilakukan oleh pihak orang tua laki-laki. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan dan melalui uji keberanian untuk membeli wanita dengan mas kawinnya piring antik yang berdasarkan pada nilai uang kesepakatan kapal perahu Johnson. Bila ternyata ada kekurangan dalam penafsiran harga perahu Johnson, maka pihak pria wajib melunasinya dan selama masa pelunasan, pihak pria dilarang melakukan tindakan aniaya walaupun sudah diperbolehkan tinggal dalam satu atap (Linggasari, [www.Wikipedia.com](http://www.Wikipedia.com)).

Dari artikel di atas menunjukkan bahwa fakta sosial yang harus dihadapi perempuan suku Asmat tidak jauh berbeda dengan yang dialami tokoh perempuan dalam novel. Hal tersebut ditandai dengan peraturan adat yang menimbulkan kekerasan terhadap mereka baik berupa kekerasan fisik maupun psikis. Artikel mengenai suku Asmat tersebut mengesankan sebuah kenyataan pahit bagi kaum perempuan suku Asmat bahwa tindakan aniaya bisa saja terjadi jika pelunasan terhadap utang mas kawin tersebut terpenuhi.

Kasus-kasus kekerasan yang terjadi dalam masyarakat seperti kasus suku Asmat merupakan tindak KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga). Dalam *monitoring* kasus kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh Komnas Perempuan di Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah, misalnya, sebagian besar perempuan korban cukup memahami dan mengenali kekerasan yang mereka alami. Hal ini terbukti dari upaya mereka untuk mencari bantuan dari para pendamping dan organisasi perempuan. Namun, rata-rata perempuan korban kekerasan, antara lain korban KDRT, tidak dengan mudah melaporkan kasusnya karena merasa takut kepada pelaku yang sebagian besar adalah suami dari korban (Komnas Perempuan, 2010).

Fakta imajiner yang terdapat dalam novel dan fakta sosial dari masyarakat seperti yang telah disajikan sebelumnya tentunya memiliki relevansi khususnya mengenai kekerasan terhadap perempuan. Pengarang dalam novel PRCM tersebut dalam menampilkan tokoh-tokoh perempuan secara langsung memberikan pencerahan kepada pembaca bahwa kekerasan pada masa

penjajahan Jepang dan pada masa 1970-an di bawah cengkraman adat merupakan bentuk ketidakadilan gender paling nyata.

Berangkat dari hal tersebut, tokoh perempuan dalam novel tersebut pun belum ada yang berusaha memerangi bentuk ketidakadilan gender itu. Hal itu disebabkan karena kondisi tekanan jiwa para tokoh perempuan sehingga masih melanggengkan bentuk kekerasan itu terjadi dalam dirinya. Belum lagi, belenggu patriarki yang dimiliki kaum laki-laki yang secara tidak langsung telah melegalkan kekerasan dan penindasan terhadap perempuan.

Begitupun dengan realitas masyarakat, para perempuan masih mengalami berbagai tindak kekerasan. Sejak zaman tradisional hingga zaman modern ini, kasus kekerasan semakin meningkat. Terjadinya kekerasan terhadap perempuan berawal dari pandangan umum laki-laki adalah tuan perempuan, sedangkan perempuan itu hamba laki-laki. Laki-laki dianggap selalu benar, sedangkan perempuan selalu dipersalahkan sehingga laki-laki dapat berbuat sekehendak hatinya kepada perempuan. Perempuan disiksa, didera, dipukul, serta tidak diberi belanja yang cukup dan rumah yang baik. Selain itu, mereka tidak diberi kesempatan untuk melihat keindahan, bermain, dan mendengarkan bunyi-bunyian yang menyenangkan dan menghilangkan kesusahan (Sugihastuti dan Suharto, 2010:308).

Seperti yang dikemukakan oleh Dien (2012:2) bahwa masalah kekerasan pada dasarnya erat kaitannya dengan kekuasaan, dan umumnya tindakan kekerasan dilakukan oleh kaum laki-laki. Dominasi laki-laki terhadap perempuan menunjukkan adanya kekuasaan laki-laki untuk berbuat sesukanya



terhadap perempuan. Hal ini juga didukung oleh sistem kepercayaan gender yang berlaku dalam masyarakat, sistem kepercayaan gender mengacu pada serangkaian kepercayaan dan pendapat tentang laki-laki dan perempuan. Pada umumnya laki-laki dianggap sosok yang lebih kuat, lebih aktif, mempunyai dominasi dan otonomi, sebaliknya perempuan dipandang sebagai makhluk yang lemah, suka mengalah dan pasif (belunggu patriarki).

Hal tersebut tentunya sejalan dengan anggapan feminisme sosialis. Feminisme sosialis dengan teori patriarki kapitalis melihat perempuan sebagai sebuah kelas, dan menganggap bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi di semua kelas. Ketidakadilan terhadap perempuan tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi lebih disebabkan oleh penilaian dan anggapan akibat konstruksi sosial terhadap perbedaan tersebut. Jadi, kekerasan yang dialami tokoh perempuan terjadi karena adanya perbedaan biologis yang membuat penilaian atau anggapan bahwa perempuan dengan berbagai pelabelan negatif yang dimilikinya memungkinkan dirinya mengalami diskriminasi.

Apabila seorang istri dimiliki oleh suami, maka ini merupakan bentuk penindasan pada perempuan. Perempuan hanya dapat dibebaskan dari penindasan ini, kalau sistem ekonomi kapitalis diganti dengan masyarakat sosialis, yaitu masyarakat egaliter tanpa kelas-kelas. Maka untuk mencapai tujuan masyarakat sosialis harus dimulai dari keluarga, di mana istri harus dibebaskan terlebih dahulu agar dapat menjadi dirinya sendiri, bukan milik

suaminya. Kalau sistem egaliter dalam keluarga dapat tercipta, maka hal tersebut akan tercermin pula pada kehidupan sosial (Megawangi, 1999:129).

### **3. Subordinasi (Anggapan Tidak Penting)**

Fakih (2012:15-16) mengemukakan subordinasi sebagai anggapan-anggapan yang muncul dalam masyarakat, misalnya anggapan bahwa wanita itu irrasional, emosional sehingga tidak dapat memimpin dan berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Seperti yang tampak pada kutipan berikut:

“Pengalaman ini bukan luar biasa. Yang luar biasa adalah adanya buangan sebelum kami: para perawan remaja yang kini telah jadi nenek, orang-orang dari Jawa, yang dijanjikan akan disekolahkan oleh Jepang di Tokyo dan Singapura. Dunia luar tak ada yang tahu tentang mereka. Tak ada yang memperhatikan nasib mereka.” (Toer, 2001: 44)

Kutipan tersebut menggambarkan tentang para tokoh perempuan yang disubordinasi secara tidak langsung. Hal ini dapat dilihat pada kalimat yang mengatakan bahwa para perawan remaja yang kini telah jadi nenek, orang-orang dari Jawa, yang dijanjikan akan disekolahkan oleh Jepang di Tokyo dan Singapura. Kalimat tersebut mengesankan sebuah penegasan bahwa para perempuan dipatahkan semangatnya dalam hal pendidikan oleh Jepang. Janji untuk disekolahkan hanya sebatas janji. Bahkan setelah itu tidak ada yang peduli terhadap nasib mereka. Dalam artian, tokoh perempuan tersebut memang dianggap tidak penting terutama dalam hal pendidikan. Pendidikan tidak diperuntukkan bagi perempuan karena mereka dipersiapkan di ranah

domestik saja. Oleh karena itu, perempuan tidak usah bermimpi untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi.

Selain itu, tokoh perempuan ter subordinasi dalam hal pengambilan keputusan. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

“Pada 1944, berumur 14 tahun, ia diambil dari orang tuanya oleh seorang opsir Jepang dengan janji akan dikirimkan ke Tokyo untuk melanjutkan sekolah. Pada mulanya, dengan berbagai dalih, orang tuanya menolak. Tetapi ketika yang berkuasa itu mulai mengancam bahwa sikap itu sama halnya dengan melawan *Tennoo Heika* (Kaisar Jepang), yang berarti menantang ancaman hukuman berat, orang tuanya hanya dapat bertanggung melepaskannya. Mereka berpisah” (Toer, 2001: 50)

Pada kutipan di atas secara implisit menggambarkan tokoh perempuan yang dianggap tidak penting dalam pengambilan keputusan. Kalimat “Pada mulanya, dengan berbagai dalih, orang tuanya menolak. Tetapi ketika yang berkuasa itu mulai mengancam bahwa sikap itu sama halnya dengan melawan *Tennoo Heika* (Kaisar Jepang), yang berarti menantang ancaman hukuman berat, orang tuanya hanya dapat bertanggung melepaskannya” secara implisit menegaskan bahwa tokoh perempuan tidak bisa berbuat banyak ketika orang tuanya dengan berat hati merelakannya untuk memenuhi janji manis Jepang tersebut. Tidak tampak tokoh perempuan dimintai pendapat oleh orang tuanya. Apalagi dengan kondisi orang tua yang tertekan dan takut akan ancaman berat dari Kaisar Jepang, sehingga ketika orang tua pasrah, tokoh perempuan pun harus menerima keputusan tersebut. Tidak jauh berbeda dengan kutipan di bawah ini.

“Dengan dalih bahwa semua demi kebesaran dan kemenangan Perang Asia Timur Raya, kami, para gadis, oleh banyak hal tidak bisa mengelakkan diri dari bujukan dan bahkan paksaan para

penguasa. Kami digiring masuk ke asrama di mana segala sesuatu sudah dipersiapkan” (Toer, 2001: 52)

Kutipan di atas menggambarkan para tokoh perempuan tidak bisa mengelakkan diri dari bujukan dan paksaan penguasa. Tokoh perempuan semakin dianggap tidak penting. Tokoh perempuan digambarkan dengan sikap yang berterima dengan segala sesuatu namun bagi para perempuan tersebut hal itu sangat merugikan mereka dan sangat menguntungkan para serdadu Jepang. Sikap pasrah yang ditunjukkan oleh para tokoh perempuan merupakan wujud dari ketidakadilan gender berupa pelabelan negatif yang disandangnya. Anggapan tidak penting yang mereka rasakan merupakan kondisi tertekan akibat perintah para serdadu Jepang (penjajah).

Selain itu, tokoh perempuan pada masa itu pun berusaha untuk menuntut agar mereka dikembalikan di Jawa, namun keberadaan mereka dianggap tidak penting. Berikut kutipannya.

“ Pada 15 Agustus 1945 Jepang menyerah. Ia dan teman-temannya mendengar juga berita itu. Mereka yang masih hidup menuntut agar dikembalikan ke Jawa. Tuntutan ditolak, bahkan mereka dijaga dan diawasi lebih keras” (Toer, 2001: 77)

Meskipun para tokoh perempuan tersebut berusaha mengeluarkan sebuah tuntutan dalam hal ini meski mereka berada dalam tekanan berat namun mereka berusaha untuk bersuara, tuntutan mereka pun tidak diindahkan. Bahkan mereka dijaga dan diawasi lebih keras. Perempuan yang digambarkan pada masa itu sungguh tidak bisa berbuat apa-apa bahkan hanya untuk

mengeluarkan sebuah putusan atau pendapat. Hal tersebut disebabkan oleh posisi kelemahan dan ketakutan yang mereka alami akibat penjajahan.

Para tokoh perempuan pada masa pendudukan Jepang tersebut dibatasi pula bertemu dengan orang lain. Secara implisit dapat dilihat pada kutipan di bawah ini.

“Di Jakarta lebih mengguncangkan. Mereka ditempatkan di bekas rumah keluarga De Boer di Jalan Bungur di dekat stasiun Senen. Seluruh halaman ditutup dengan pagar bambu anyaman tinggi, tak dapat dilihat dari jalanan. Apa sebab dipagar rapat dan tinggi? Agar orang tak tahu apa yang sedang terjadi di dalam. Sudah barang tentu sesuatu yang tidak patut dan tidak terpuji. Mereka juga dijaga dan dikawal. Tujuannya jelas: agar mereka tidak berhubungan dengan orang luar, agar tak ada kenalan dapat bertemu, dan agar tak ada berita tentang mereka. Ya, mereka tidak diperkenankan keluar dari tempat itu”(Toer, 2001:26-27).

Kutipan di atas menjelaskan tokoh perempuan yang tidak dapat berhubungan dengan dunia luar. Hal tersebut semakin menjadikan tokoh perempuan dianggap tidak penting oleh pemerintah Jepang kala itu. Hal itu dipertegas dengan tujuan agar para tokoh perempuan yang dijadikan budak seks tersebut tidak terdengar beritanya. Dengan demikian, serdadu Jepang semakin meluruskan niat jahatnya dalam menghilangkan jejak-jejak perbuatannya dalam penyiksaan tokoh-tokoh perempuan.

Hal seperti itu terjadi pula ketika para tokoh perempuan tersebut menjadi buangan di Pulau Buru. Kungkungan adat suku Alfuru membatasi ruang dan gerak mereka. Akibatnya, tokoh perempuan tersebut hidup penuh dengan berbagai ketakutan akan aturan adat. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut:

“Suami saya tidak pernah membiarkan saya berbicara dengan orang lain semacam ini. Apalagi kalau diketahuinya saya menggunakan bahasa yang ia tidak paham. Ia terlalu mencurigai saya. Apalagi setelah banyak orang dari Jawa datang kemari. Keadaan ini semakin menyempitkan ruang gerak saya. Karena itu saya mengharap, kalau nanti pulang ke Jawa, bawalah saya” (Toer, 2001: 51)

“Dari keterangan seorang teman lain yang pernah bicara dengannya, ternyata ibu yang setua dan serapuh itu tidak luput dari siksa dan aniaya sampai darahnya berlelehan dari tubuhnya, hanya karena ia ketahuan telah berbicara dengan bahasa yang tidak dikenal oleh lingkungannya, adatnya, atau berhubungan dengan orang-orang dari seberang. Wanita tidak boleh bicara dalam bahasa apa pun kecuali bahasa Buru” (Toer, 2001: 97)

Dari uraian tersebut tampak jelas menggambarkan tentang kehidupan para tokoh perempuan yang diperhadapkan dengan adat istiadat suku Alfuru. Gerak mereka dibatasi bahkan dengan penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa yang tidak diketahui oleh suaminya akan membuat suaminya curiga bahkan disiksa dan dianiaya. Hanya bahasa Buru yang dapat digunakan dalam lingkungannya tersebut.

Hal tersebut semakin memperjelas bahwa tokoh perempuan digambarkan sebagai makhluk yang lebih rendah posisinya dibandingkan dengan laki-laki. Pembatasan penggunaan bahasa oleh para suami secara implisit mengesankan kekuasaan tertinggi berada di tangan para lelaki dan perempuan pada posisi yang rendah. Akibatnya pun sangat fatal jika tokoh perempuan melanggar hal tersebut karena mereka akan disuguhkan dengan kekerasan fisik oleh para suaminya.

Fakta imajiner dalam novel PRCM tersebut, terdapat pula pada fakta sosial masyarakat. Para perempuan berada pada posisi subordinat. Pada tahun 1940-

an misalnya ketika Jepang berkuasa, posisi kaum perempuan dianggap tidak penting. Perempuan hanya dibiarkan bermimpi memiliki pendidikan tinggi namun kenyataannya mereka mendapat pekerjaan yang tidak memanusiawikan mereka (Adhidarta, 2012).

Hilde Jenssen (dalam Arkasuta, 14/12013) menyebutkan ada suatu kasus di suatu pulau, terjadi pembunuhan massal oleh serdadu Jepang akibatnya adanya pembalasan dendam dari serdadu Jepang karena penolakan masyarakat terhadap permintaan Jepang yang meminta untuk menyerahkan perempuan, begitu juga yang terjadi di Sumatera. Menurutnya, untuk tidak mengurangi rasa hormatnya kepada para korban *jugun ianfu*, maka ia menyebutnya sebagai pekerja paksa seksual. Sebab mereka bisa menjadi *jugun ianfu* atas dasar keterpaksaan. Siapa pun tidak akan ada yang senang dan rela jika menjadi *jugun ianfu*.

Bentuk keterpaksaan tersebut, salah satu bentuk subordinasi dari serdadu Jepang terhadap perempuan kala itu. Kesiediaan perempuan tidak lagi dipertanyakan sehingga mereka pasrah dan menerima perannya sebagai pekerja seks untuk para serdadu atau tentara Jepang.

Adanya kekuasaan laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan perempuan juga tampak dalam lingkungan keluarga. Perempuan dalam penentuan sikap akan tetap berada dalam pengawasan laki-laki. Artinya, perempuan tidak semata-mata menyetujui suatu keputusan tanpa keputusan dari laki-laki sebelumnya. Jika laki-laki tidak mengindahkan sebuah keputusan perempuan, maka perempuan tetap berterima dengan kondisi seperti itu. Hal itu

disebabkan oleh nilai-nilai sosial yang dikonstruksi masyarakat sejak dulu. Prinsip kesopanan terhadap pemimpin rumah tangga juga menjadi halangan berkembangnya perempuan dalam sebuah pengambilan keputusan. Dengan kata lain, setiap gerakan yang dilakukan perempuan berada dalam pengawasan laki-laki sebagai makhluk yang lebih tinggi tingkat kekuasaannya dibanding perempuan.

Komnas Perempuan dalam sebuah artikel menyatakan bahwa ketika perempuan berkegiatan hingga malam hari dan jarang berada di rumah, meskipun ia perempuan bekerja untuk kemanusiaan, perempuan tetap dianggap sebagai perempuan yang tidak baik dalam komunitas budayanya. Pada beberapa masyarakat adat, bahkan perempuan harus selalu didampingi ke mana pun ia pergi.

Hal serupa terjadi pada masyarakat Papua, perbedaan gender dalam masyarakat Papua sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki. Patriarki merupakan kekuasaan bapak (kaum lelaki) yang mendominasi, menyubordinasikan, dan mendiskriminasi kaum perempuan. Segala bidang terpusat pada laki-laki, perempuan memiliki peran untuk mengurus pangan, ternak, anak, dan pekerjaan rumah tangga (urusan domestik). Sedangkan segala urusan publik berada di tangan kaum lelaki. Perempuan kurang terlibat dalam proses pengambilan keputusan baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat (Goo, *Majalah Selangkah*: 22/6/2012).

Adanya diskriminasi terhadap perempuan semakin mengharuskan perempuan menerima segala bentuk stereotipe yang dilekatkan pada dirinya



terlebih karena pengaruh kodrat. Hal tersebut membawa kedudukan superordinat bagi laki-laki sedangkan bagi kaum perempuan berada pada posisi subordinat. Perempuan dianggap tidak penting bahkan tidak sejajar dengan laki-laki sehingga perempuan diasumsikan harus selalu menggantungkan diri dan hidupnya kepada laki-laki.

Berangkat dari hal tersebut, tampaklah pengarang dalam novel menggambarkan tokoh-tokoh perempuan sebagai makhluk lemah yang mengalami subordinasi dalam berbagai hal. Pengarang ingin menampilkan bahwa stereotipe pada akhirnya selalu berujung kekerasan dan anggapan-anggapan yang tidak penting bagi perempuan. Hal itu sejalan dengan realitas masyarakat, bahwa subordinasi pun masih menjadi kendala bagi perempuan untuk keluar dari belenggu ketidakadilan.

Sanday (dalam Sugihastuti dan Saptiawan, 2010:334) menegaskan bahwa lingkup publik meliputi aktivitas-aktivitas ekonomi dan politik yang bertempat atau berpengaruh kuat melebihi unit keluarga domestik dan hal tersebut berkenaan dengan masalah kontrol terhadap orang atau benda-benda. Pada situasi ini, laki-laki menjadi pihak yang berada pada lingkup publik dengan peran yang aktif dan dominan, yang dengan demikian membuat laki-laki memiliki kekuasaan dan wewenang untuk melakukan kontrol terhadap individu-individu khususnya perempuan yang berada dalam lingkup domestik.

Ketidakadilan gender seperti itulah yang diperangi oleh feminisme sosialis. Agar subordinasi tidak dilanggengkan terus menerus, maka

perempuan harus berani memerangi visi dan ideologi masyarakat tentang perempuan. Perempuan harus bangkit menunjukkan bahwa perempuan bisa memutuskan sesuatu, perempuan layak mendapatkan pendidikan dan posisi yang sama dengan laki-laki (Fakih, 2012:92-93). Namun, dalam novel tersebut dan kenyataan yang ada dalam masyarakat, para perempuan belum berani keluar dari keterkungungannya. Hal tersebut berakibat pada semakin dilanggengkannya kondisi di mana perempuan inferior dan laki-laki superior.

#### **4. Beban Kerja**

Beban ganda (*double burden*) artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan.

Beban ganda yang dialami tokoh perempuan dalam novel PRCM dapat dilihat pada kutipan berikut.

“Kami dapat memahami sepenuhnya: para suami Alfuru itu takut istrinya meninggalkan Buru dan kembali ke Jawa. Ketakutan ini didasarkan atas pandangan adat setempat bahwa istri adalah harta bagi suami, sama dengan harta lainnya yang bisa dipertukarkan, dijual, diwariskan kepada adik atau bapa, dan lebih parah lagi: menjadi sumber tenaga dan penghidupan bagi suami” (Toer, 2001: 59)

Kutipan di atas secara langsung menggambarkan kehidupan tokoh perempuan atau istri yang menjadi sumber tenaga dan penghidupan bagi suami. Kalimat tersebut, menjadi bukti bahwa perempuan mengalami beban

kerja ganda. Hal itu disebabkan karena selain menjadi seorang istri, tokoh perempuan tersebut menjadi sumber penghidupan bagi suami. Beban kerja yang dialami oleh tokoh perempuan tersebut terjadi karena pengaruh kekuasaan tokoh laki-laki yang menganggap diri lebih tinggi derajatnya. Kesewenang-wenangan pun terjadi hingga para tokoh perempuan mengerjakan semua pekerjaan domestik tanpa pembagian kerja yang menguntungkan, justru sebaliknya.

Adanya tradisi yang menganggap perempuan sebagai harta bagi suami menjadi faktor keterkungkungan para tokoh perempuan dalam ranah domestik khususnya dalam persoalan beban kerja. Beban kerja berlebihan yang dialami perempuan selalu dalam pengawasan ketat para suami. Hal tersebut menguatkan kesewenang-wenangan para suami terhadap tokoh-tokoh perempuan tersebut seperti yang tergambar pada kutipan ini.

“Mereka kemudian lebih ketat dikawal bila meninggalkan kampung atau soa untuk berpanen kacang tanah di ladang atau huma. Pada puncak musim kering, April dan September (di Buru terdapat dua kali musim hujan dan musim kering), isi seluruh soa turun ke rawa-rawa yang telah dangkal untuk menangkap mujair” (Toer, 2001: 59)

Kehidupan perempuan yang mengalami beban kerja ketika mereka hidup menjadi buangan di Pulau Buru tergambar pada kutipan di atas. Perempuan selain sebagai istri, mereka juga bekerja di ladang untuk bertanam kacang tanah. Selain itu, mereka para perempuan juga menangkap mujair kala musim kering di wilayah tersebut. Dalam artian, para tokoh perempuan mengalami diskriminasi pekerjaan dari para suami. Para tokoh perempuan seyogyanya

mengharapkan pekerjaan di luar ranah domestik mereka, namun yang mereka alami justru berlebihan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Beban kerja ganda yang dialami tokoh perempuan tersebut tentunya akan berat dipikul oleh tokoh perempuan, apalagi dengan kondisi lingkungan yang keras akan membuat perempuan mendapat tekanan yang berat. Kondisi demikian akan dirasakan para tokoh perempuan sebagai bentuk ketidakadilan gender yang merupakan akibat dari stereotipe dan subordinasi yang mereka alami.

Beban kerja ganda yang dialami oleh tokoh perempuan terjadi pula sebelum mereka menjadi buangan atau ketika mereka masih berada pada masa pendudukan Jepang. Berikut kutipannya.

“Berbeda dari yang belakangan ini, mereka agak sopan. Sekarang empat orang Jepang menguasai diri sahaya. Mereka panggil sahaya ‘bujang’, ‘koki’, dan lain-lain, dan harus bekerja untuk mereka. Di malam hari mereka meniduri sahaya” (Toer, 2001: 63)

Kutipan di atas menggambarkan tokoh perempuan yang harus menanggung beban kerja ganda karena harus melayani para sadaku Jepang dalam ranah seksual dan menjadi pembantu atau koki juga untuk para serdadu Jepang tersebut. Kedua pekerjaan tersebut tidak menguntungkan bagi para tokoh perempuan sebab pekerjaan yang mereka jalani bukan pekerjaan yang diharapkan atau yang mereka idamkan. Namun, kondisi tekanan jiwa dan mental pada masa itu mengharuskan mereka menjalani beban kerja ganda tersebut.

Selain itu, para tokoh perempuan tersebut juga mendapat *konsinye*. *Konsinye* merupakan larangan meninggalkan tempat kerja karena harus siap

bertugas sewaktu-waktu atau harus menyelesaikan tugas yang mendesak.

Seperti dalam kutipan berikut:

“Di Buru, sebelum datangnya balatentara Sekutu, para wanita muda itu dikenakan konsinye keras” (Toer, 2001:20).

Tampak dalam kutipan di atas bahwa tokoh perempuan dikenakan *konsinye* keras sehingga setelah melayani nafsu bejat para serdadu Jepang, mereka harus siap dengan tugas yang sewaktu-waktu bisa datang untuk mereka. *Konsinye* merupakan bentuk intimidasi pekerjaan yang dialami oleh tokoh perempuan. Hal tersebut menegaskan bentuk ketidakadilan gender dalam bentuk beban kerja yang sangat merugikan waktu, fisik, dan pikiran para tokoh perempuan.

Tidak hanya dalam novel PRCM, dalam kehidupan sehari-hari pun digambarkan beban kerja ganda yang dialami oleh para tokoh perempuan. Artikel Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (2013) mengungkapkan bahwa banyak kasus perempuan yang berhasil bekerja di ranah publik namun tidak diiringi dengan berkurangnya beban mereka di wilayah domestik. Upaya maksimal yang dilakukan mereka adalah menubstitusikan pekerjaan tersebut kepada perempuan lain, seperti pembantu rumah tangga atau anggota keluarga perempuan lainnya. Namun demikian, tanggung jawabnya masih tetap berada di pundak perempuan. Akibatnya, mereka mengalami beban yang berlipat ganda.

Kenyataan mengenai beban kerja ganda dalam realitas sosial terjadi pada perempuan Bali. Perempuan Bali dipaksa mengalah pada laki-laki. Laki-laki lebih diistimewakan. Pasalnya, selain karena jadi penerus silsilah dan tulang

panggung keluarga, laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar di masyarakat. Ironisnya, dalam kehidupan sehari-hari perempuan justru mendapat tugas pekerjaan yang lebih berat (Tim Bali Sruti, 28/11/2011).

Artikel di atas mengesankan perempuan Bali yang ingin setara dengan laki-laki terutama dalam hal pekerjaan tidak dapat terealisasi. Hal itu disebabkan oleh tradisi kental yang menganggap laki-laki sebagai makhluk yang diistimewakan dibandingkan dengan perempuan. Perempuan tidak boleh terjun ke ranah publik.

Begitu pun dalam masyarakat Papua yang dituliskan oleh Goo (22/6/2012) dalam artikel yang berjudul *Memahami Masalah Perempuan Papua dalam Budaya dan Kesehatan* berikut ini.

Pada zaman dahulu, peran tradisional laki-laki dan perempuan dikatakan cukup seimbang. Laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama beratnya. [...] Saat ini, setelah adanya akulturasi (kontak budaya) dengan dunia luar, peran-peran tersebut berubah. Sebagian besar peran laki-laki berkurang atau hilang, seperti urusan perang, menjaga keamanan dengan adanya teknologi baru yang diperkenalkan. Dengan demikian, saat ini laki-laki memiliki banyak waktu luang.

Dengan demikian, di satu sisi laki-laki bertangan kosong karena perannya berkurang atau hilang. Di sisi lain, perempuan memiliki beban kerja yang cukup berat. Laki-laki dikatakan pada kondisi yang sedang “kebingungan” untuk mengisi kekosongan perannya. Bahkan bisa dikatakan laki-laki Papua dari daerah pegunungan, saat ini sedang berada pada tahap kehilangan identitas (mempertanyakan keberadaan dirinya). Dapat dibayangkan bahwa pada saat ini telah terjadi ketimpangan atau ketidakadilan dalam pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang berada pada posisi yang berbeban berat.

Kaum perempuan di Papua seperti yang disebutkan dalam artikel di atas mengalami beban kerja yang berat karena kaum laki-laki mendapat porsi kerja

yang sedikit karena pengaruh kontak dengan dunia luar. Hal tersebut semakin membawa perempuan ke ranah penderitaan. Perempuan yang memiliki harapan agar mampu bersaing di ranah publik pada akhirnya harus mengalami beratnya pekerjaan yang dilakukan. Perempuan tidak lagi mendapatkan keadilan dalam pekerjaan akan tetapi mengalami penindasan atau intimidasi sedangkan laki-laki sibuk dengan kurangnya peran yang diemban. Apalagi budaya dalam masyarakat Papua yang memeluk budaya patriarki.

Selain budaya patriarki, salah satu budaya yang merugikan kaum perempuan di Papua adalah budaya denda. Budaya denda yaitu segala persoalan dalam masyarakat harus diselesaikan dengan pembayaran denda uang atau babi. Kaum perempuan dituntut dapat menghasilkan banyak uang atau babi untuk keluarganya. Selain itu, perempuan Papua dianggap sebagai lambang kesuburan yang sering dimanfaatkan kaum lelaki untuk memperoleh harta lebih banyak dan laki-laki dianggap tidak pantas mengerjakan tugas yang selama ini dianggap sebagai tugas perempuan, masyarakat Papua menyebutnya Tabu.

Aturan dan tradisi yang dianut oleh masyarakat Papua tersebut semakin dirasakan kaum perempuan sebagai bentuk ketidakadilan dalam bidang pekerjaan yang berlebihan. Adanya anggapan bahwa laki-laki tidak pantas mengerjakan tugas perempuan dan laki-laki bisa memanfaatkan perempuan untuk memperoleh harta merupakan kesalahpahaman atau salah pengertian bagi kaum perempuan yang berharap setara dengan laki-laki di ranah publik.

Fakta imajiner yang terdapat dalam novel dan fakta sosial dalam masyarakat memiliki kaitan mengenai beban kerja yang dialami perempuan merupakan suatu bukti ketidakadilan gender. Pengarang dalam novel tersebut tidak hanya menampilkan bentuk ketidakadilan dari segi anggapan tidak penting, penandaan negatif, hingga pada bentuk kekerasan, akan tetapi mencoba menampilkan sebuah realitas dalam novel tersebut bahwa perempuan memiliki beban kerja ganda. Pengarang menampilkan sebuah fakta imajiner yang mengesankan bahwa tokoh perempuan yang menjadi budak seks harus dihadapkan dengan pekerjaan lain pada masa itu. Begitu pun ketika tokoh perempuan berhadapan dengan aturan adat yang membelenggunya.

Fakta imajiner yang ditampilkan pengarang tentunya berkaitan dengan fakta sosial masyarakat. Dalam artian, beban kerja semakin menjadikan perempuan sebagai makhluk yang bersahabat dengan ketidakadilan. Adanya aturan adat dan budaya patriarki yang berlaku dalam masyarakat mengakibatkan perempuan tertindas dalam hal pekerjaan. Perempuan harus melaksanakan pekerjaan di ranah domestik sendirian, dan di ranah publik pun mereka harus menanggung beban untuk menghidupi suami atau justru dimanfaatkan oleh suami. Padahal, hakikatnya seorang perempuan ingin setara dengan laki-laki dengan menyubtisisikan pekerjaan domestik sebagian kepada pembantu rumah tangga, misalnya atau berbagi pekerjaan dengan suami secara adil dan bijaksana. Hal tersebut diharapkan tidak merugikan salah satu pihak.



Diskriminasi melalui beban kerja yang seperti inilah bagi kaum feminisme sosialis merupakan bentuk eksploitasi kelas. Dengan demikian feminisme sosialis berusaha melakukan kritik terhadap eksploitasi kelas. Segala bentuk diskriminasi dan dominasi terhadap kaum perempuan merupakan bentuk ketidakadilan gender yang harus diperangi.

Hanya saja yang terjadi dalam novel dan realitas masyarakat yaitu perempuan semakin tunduk dengan kondisi beban kerja ganda yang berada di pundaknya. Mereka belum berusaha untuk keluar dari zona ketidaknyaman tersebut. Oleh karena itu, wanita dianggap inferior, sebagai budak yang tidak memunyai kekuasaan apa-apa. Di sisi lain, laki-laki dianggap superior sehingga memiliki kekuasaan yang sewenang-wenang.

## **5. Marginalisasi**

Marginalisasi adalah semakin miskin dan tersingkirkannya (kaum perempuan) karena tidak mendapatkan sesuatu, misalnya pekerjaan, contohnya pekerjaan di sawah pada musim panen. Hal ini juga dapat terjadi dalam rumah tangga (diskriminasi), masyarakat, kultur dan negara, tafsir keagamaan (Sugihastuti dan Sastriyani, 2007: 146).

Contoh kasus marginalisasi yang dialami oleh tokoh perempuan dalam novel PRCM dapat dilihat pada kutipan berikut.

“Dari catatan-catatan yang terkumpul, para perawan remaja itu berasal dari kota besar, madya, atau kecil, atau dari kampung dan desa yang ada di dalam kawasan kota. Tak terdapat data yang menunjukkan berasal dari kampung atau desa yang jauh dari kota. Hal itu disebabkan karena di tempat-tempat yang belakangan ini keadaan begitu parah: panen dikuasai Jepang, tenaga pria terkena

*roomusha* dan kelaparan merajalela. Maka para perawan remaja yang menderita kelaparan itu sudah sangat dekat dengan liang kubur, sama sekali tidak menarik selera Jepang ” (Toer, 2001: 16)

Kutipan di atas menunjukkan bahwa perempuan yang menderita kelaparan tidak menarik selera Jepang. Maksudnya, Jepang hanya mencari perawan remaja yang cantik dan sehat untuk diberikan janji akan disekolahkan ke Tokyo. Tokoh perempuan yang menderita kelaparan seperti itu tidak lagi diperhitungkan dalam ranah publik. Hal tersebut disebabkan oleh keinginan para serdadu Jepang untuk menjadikan budak seks perawan remaja yang menarik perhatian mereka. Selain itu, kutipan di atas mengesankan pula bahwa dalam perekrutan tokoh perempuan yang dijanjikan bersekolah, para serdadu Jepang memilih perempuan yang memiliki hubungan antara orang tua mereka dan pemerintah Jepang. Jadi, perempuan yang berasal dari keluarga menengah ke bawah tidak diperuntukkan untuk itu.

Selain itu, tokoh perempuan ketika menjadi buangan mengalami pemiskinan ekonomi sebab tidak mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya, dan lebih parahnya ketika perempuan tersebut dalam ketentuan adat ternyata dapat diperjualberikan. Seperti yang terlihat pada kutipan berikut ini.

“Perempuan susah. Di sini perempuan susah. Mahal. Hari-hari perempuan biking susah. Mahal harga. Banyak perkara karena cari perempuan” (Toer, 2001: 136)

“Bukang perempuan undang harta, Ngama, hanya harta mencari perempuan” (Toer, 2001: 182)

Kutipan di atas mengesankan bahwa tokoh perempuan termarginalkan dalam hal jual beli dirinya. Tokoh perempuan dianggap mahal dan menyusahkan laki-laki. Hal tersebut terjadi karena dalam novel tersebut masyarakat Pulau Buru masih memegang teguh adat istiadat mereka. Tokoh perempuan hanya dianggap sebagai harta yang harus dibeli bahkan dipertukarkan. Hal itulah yang menjadi landasan bagi tokoh laki-laki untuk bersikap sewenang-wenang terhadap tokoh perempuan. Tokoh perempuan dalam adat untuk dijualbelikan dijelaskan secara eksplisit pada kutipan di bawah ini.

“Kepala adat hanya menggelengkan kepala dan membantahnya dengan dalih adat: adat perempuan dibeli; adat orangtua menjual; kalau harta sudah tersedia apalagi akan dipersoalkan? ” (Toer, 2001: 197)

Kutipan tersebut menjelaskan tokoh perempuan pada masa itu digambarkan layaknya sebuah barang yang dapat dibarter. Posisi tokoh perempuan tersebut sangat dimarginalkan. Di sisi lain, mereka tidak mendapat pekerjaan, justru mereka dianggap sebagai barang yang dapat diperjualbelikan dan hal itu merupakan suatu kewajaran.

Hal yang dialami oleh para tokoh perempuan itu seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, sudah menjadi ketentuan adat. Perempuan dapat diwariskan, bahkan dengan prinsip adat mereka yang menyatakan “adat perempuan dibeli; adat orangtua menjual” semakin membuat tokoh perempuan berada pada posisi termarginalkan.

Tokoh perempuan dalam novel tersebut berhadapan dengan adat yang mengharuskannya dibeli, perempuan dapat dibeli dengan menggunakan babi, tombak, parang dll. Seperti pada kutipan berikut:

“Apa saja barang yang kau gunakan membeli istrimu yang kedua dari Wai Loa itu?”

Sambil menyalakan tembakau yang digulung dengan daun pohon kikir di bibir ia menjawab:

“Babi, tombak, parang, kain balacu, sarong seberang, dan banyak lagi. Pokoknya warot, banyak.”

Babi dihitung berapa harta?

“Tidak sama, ada besar ada kecil. Bisa banyak bisa tidak,” tangan kirinya yang bercincin dan bergelang terangkat menunjuk ke halaman. Seekor babi yang bertaring panjang berjalan lenggak-lenggok memamerkan pantatnya yang berlumuran lumpur. “ha, fafu warot, babi tua, itu dihitung 70 harta” (Toer, 2001: 136)

Kutipan di atas merupakan percakapan yang terjadi antara tokoh Polli dan tokoh Kai. Tokoh Kai digambarkan membeli istri keduanya dengan babi, tombak, parang, kain balacu, sarong seberang dan sebagainya. Hal tersebut semakin memperkuat ketidakadilan gender yang dialami tokoh perempuan dalam bentuk marginalisasi. Tokoh perempuan dapat dibeli dengan cara barter dan lebih ironisnya lagi, tokoh perempuan yang menjadi sumber penghasilan seperti yang dikemukakan sebelumnya.

Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa marginalisasi yang dialami oleh tokoh perempuan disebabkan oleh adat yang kemudian menjadikan laki-laki sebagai penguasa. Perempuan dibeli atau perempuan sebagai harta merupakan wujud ketidakadilan gender bagi para tokoh perempuan. Dalam artian, jika tokoh perempuan hidup dengan adat demikian, maka mereka harus siap dengan segala konsekuensi yang akan terjadi terhadap dirinya.

Termarginalkannya perempuan tidak hanya terjadi pada novel PRCM, dalam kehidupan sehari-hari pun perempuan mengalami posisi termarginalkan. Kodrat perempuan seperti melahirkan, menyusui dan menstruasi mengakibatkan terkendalanya perempuan dalam bersaing di ranah publik. Hal itu menegaskan bahwa perempuan memiliki ruang di ranah domestik saja. Anggapan seperti itu tentunya memarginalkan perempuan. Anggapan bahwa setinggi-tingginya pendidikan yang mampu perempuan capai, namun tempat yang layak untuk perempuan hanyalah dapur.

Hal tersebut dapat dilihat dalam realitas perempuan Bali. Marginalisasi perempuan masih kerap terjadi di lingkungan adat Bali. Dalam banyak hal, perempuan dinomorduakan di bawah laki-laki. Hak perempuan sering diabaikan. Dalam hal warisan, misalnya, perempuan Bali tak mendapat hak semestinya.

Tim Bali Sruti (2011) dalam artikel yang berjudul *Lupakan Marginalisasi, Muliakan Perempuan* menyatakan bahwa kaum lelaki dalam hukum adat Bali memang jauh lebih berkuasa berdasarkan garis *Pusura*. *Pusura* dilekatkan kepada lelaki Bali berakar pada aturan yang ditetapkan pada masa kolonial. Tepatnya melalui Lavering Adat Bali yang dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda pada 13 Oktober 1900. Status *Pusura* berarti kemampuan untuk mengurus dan meneruskan *Swadharma* (tanggung jawab) keluarga. Yakni, dalam masalah *parahyangan* (hubungan dengan Tuhan), *pawongan* (hubungan sosial), dan *palemahan* (pengaturan lingkungan). Kaum perempuan dianggap tidak memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab itu.

Konsekuensinya, mereka tidak diberi *swadikara* (hak waris) sedikit pun. Selain itu, ketika terjadi perceraian, pihak perempuan sama sekali tidak mendapat pembagian harta *gunakarya* alias harta usaha bersama.

Kenyataan yang dialami oleh perempuan Bali bahwa mereka termarginalisasi dalam hal ekonomi karena mereka selain tidak mendapatkan pekerjaan, mereka juga tidak mendapatkan hak waris bersama. Hal tersebut merupakan akibat dari adat istiadat yang masih dipegang oleh masyarakat Bali.

Selain itu, sistem jual beli dalam pernikahan seperti yang terdapat dalam fakta imajiner terdapat pula dalam fakta sosial. Seperti yang terjadi pada suku Pekal. Berikut kutipannya dalam sebuah artikel.

“Dalam adat suku Pekal, perempuan itu *dijujur* atau dibeli oleh laki-laki, kebalikan dari adat suku Minang. Jika seorang perempuan itu sebelum menikah akan dimandikan dengan uang logam dan disumpah, maka perempuan itu telah dijual kepada calon suaminya dan telah menjadi hak dari suaminya. Uang yang berasal dari pembelian adiknya tadi juga dipakai oleh kakaknya untuk membeli perempuan yang akan jadi calon istrinya”(www.wikipedia.com).

Dari kutipan di atas, menunjukkan bahwa kaum perempuan mengalami marginalisasi dalam bukan hanya di bidang ekonomi atau pekerjaan melainkan dalam ranah domestik yaitu keluarga, perempuan mengalami kondisi yang kurang menyenangkan oleh sistem jual beli dalam suatu proses pernikahan. Perempuan dinilai sebagai barang yang dapat dipertukarkan. Dari sistem jual beli atau barter yang dialami perempuan semakin melanggengkan budaya patriarki baginya. Hal itu disebabkan oleh anggapan atau nilai seorang

perempuan sebagai barang, menjadikannya sebagai “milik” yang leluasa dikontrol oleh laki-laki.

Hal tersebut dialami pula oleh perempuan suku Asmat. Adanya mas kawin piring antik berdasarkan pada kesepakatan kapal perahu Johnson, maka perempuan akan berada pada posisi patuh dan harus melayani segala keinginan suami. Menurut Linggasari (2004), perempuan Asmat harus menyediakan segala keperluan suaminya agar dapat terus bekerja. Terkadang para perempuan harus memangur, meramah, dan mengolah sagu bahkan menjaring ikan. Namun, ironisnya jika laki-laki Asmat yang dalam kesehariannya bekerja dengan mengukir, hasil ukiran yang terjual hanya berada di tangan para suami, perempuan Asmat tidak menerima imbalan apapun untuk jerih payahnya.

Fakta-fakta sosial di atas tentunya berkaitan dengan fakta imajiner yang ada dalam novel PRCM. Tokoh perempuan mengalami bentuk ketidakadilan gender yaitu marginalisasi. Secara eksplisit, pengarang menggambarkan peran-peran tokoh perempuan hingga timbul berbagai bentuk pemiskinan ekonomi yang dialami. Marginalisasi yang dialami perempuan dalam novel tersebut semakin mendukung asumsi bahwa perempuan dinomorduakan dan perempuan tidak memperoleh kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Tokoh perempuan yang ada dalam novel dan kaum perempuan dalam realitas sosial masyarakat belum sepenuhnya lepas dari jeratan marginalisasi. Perempuan-perempuan dalam realitas sosial tersebut masih terkungkung

dengan sistem dan aturan yang dikonstruksi oleh masyarakat itu sendiri. Sikap patuh dan tunduk terhadap sistem dan aturan atau tradisi dengan sendirinya semakin memarginalkan kaum perempuan khususnya dalam bidang ekonomi. Jadi, kesempatan untuk memiliki hak agar setara dengan laki-laki hanya impian belaka.

Bagi kaum feminisme sosialis ketidakadilan gender yang mengakibatkan marginalisasi terhadap perempuan disebabkan karena penindasan di semua kelas. Ketimpangan gender di dalam masyarakat adalah akibat penerapan sistem kapitalis yang mendukung terjadinya tenaga kerja tanpa upah bagi perempuan di dalam lingkungan rumah tangga. Istri memunyai ketergantungan lebih tinggi pada suami daripada sebaliknya. Perempuan senantiasa mencemaskan keamanan ekonominya, karenanya, mereka memberikan dukungan kekuasaan kepada suaminya (Umar, 2010:28-29).

Feminisme sosialis mengkritik asumsi umum, bahwa hubungan antara partisipasi perempuan dalam ekonomi memang perlu, tapi tidak selalu akan menaikkan status perempuan. Rendahnya tingkat partisipasi berkorelasi dengan rendahnya status perempuan. Tetapi keterlibatan perempuan justru dianggap akan menjerumuskan perempuan, karena mereka akan dijadikan budak (*virtual slaves*). Bagi feminisme sosialis meningkatnya partisipasi perempuan dalam ekonomi lebih berakibat pada peran antagonisme seksual ketimbang status (Fakih, 2012: 90-91). Untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan supaya seimbang dengan laki-laki bagi kaum feminisme



sosialis, diperlukan peninjauan kembali struktural secara mendasar, terutama dengan menghapuskan dikotomi pekerjaan sektor domestik dan sektor publik.

Dari berbagai fakta imajiner mengenai ketidakadilan gender yang dialami oleh tokoh perempuan dalam novel PRCM dapat disimpulkan bahwa ketidakadilan gender yang dialami baik itu stereotipe, kekerasan, subordinasi, beban kerja maupun marginalisasi dialami pula perempuan dalam realitas sosial masyarakat. Realitas masyarakat yang dimaksud yakni realitas penjajahan yang dialami oleh bangsa Indonesia dan realitas-realitas yang terjadi dalam beberapa suku di Indonesia dengan belunggu adat istiadat yang masih kuat.

Namun yang menjadi kunci utama ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan baik yang terjadi dalam novel PRCM maupun yang terjadi dalam realitas sosial masyarakat adalah ketidakmampuan para perempuan tersebut dalam melawan segala bentuk penindasan yang dialaminya. Seperti yang diusung oleh feminisme sosialis bahwa penindasan terjadi di semua kelas, ketidakadilan tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi lebih disebabkan oleh penilaian dan anggapan akibat konstruksi sosial terhadap perbedaan tersebut. Oleh karena itu yang harus diperangi adalah konstruksi visi dan ideologi masyarakat serta struktur dan sistem yang tidak adil yang dibangun atas bias gender.

### **C. Dampak dari Ketidakadilan Gender yang Dialami oleh Perempuan**

Berdasarkan ketidakadilan gender yang dialami tokoh perempuan dalam novel PRCM tersebut maka, ditemukan berbagai dampak yang dihasilkan dari ketidakadilan gender tersebut. Dampak-dampak tersebut antara lain, beban moral, beban psikologis, hancurnya idealisme, kemerosotan peradaban dan kebudayaan serta hilangnya nilai-nilai kemanusiaan. Berikut uraian dampak ketidakadilan gender tersebut.

#### **1. Beban Moral**

Beban menurut KBBI (2008:113) adalah sesuatu yang berat (sukar) yang harus dilakukan atau ditanggung, sedangkan moral merupakan ajaran tentang baik buruknya yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dsb. Jadi, beban moral dapat diartikan sebagai sesuatu yang ditanggung akibat perbuatan yang dilakukan atau yang dialami. Beban moral yang dialami tokoh perempuan dalam novel PRCM dapat dilihat pada uraian berikut.

“Setelah Jepang menyerah, mereka ingin sekali kembali ke kampung halaman dan keluarga. Tetapi pengalaman buruk telah menjadi beban moral yang berat, sehingga mereka tidak sampai hati bertemu kembali dengan orang tua, sanak saudara, dan kenalan. Sebagian lagi karena tidak mempunyai dana dan daya untuk pulang, dan memang tidak berani pulang. Lihatlah waktu meninggalkan keluarga- senang atau tidak senang- mereka bersiap pikiran untuk meneruskan pelajaran. Mereka membayangkan diri akan pulang sebagai manusia yang lebih berilmu dan berpengetahuan. Dan oleh Jepang mereka dipaksa untuk memasuki kekejian, kemesuman, dan kehinaan ” (Toer, 2001: 19)

Kutipan di atas menunjukkan dampak ketidakadilan gender yaitu beban moral yang dialami tokoh perempuan. Akibat pengalaman buruk ketika

mereka harus melayani nafsu para serdadu Jepang membuat beban moral yang berat bagi tokoh-tokoh perempuan dalam novel tersebut. Mereka malu bertemu keluarga dan sanak saudara. Mereka tidak pernah membayangkan harapan keluarga mereka untuk melihat para perempuan tersebut berpendidikan ternyata pupus begitu saja akibat kekejaman serdadu Jepang. Berangkat dari hal itulah, para tokoh perempuan tersebut mengalami beban moral yang merupakan akibat dari kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang dihadapinya.

Di balik kepasrahan yang mereka tunjukkan, para tokoh perempuan sebenarnya memiliki keinginan untuk kembali kepada keluarga begitu besar namun mereka terkendala dengan uang dan tidak adanya kenalan di luar negeri. Keinginan itu pun semakin surut dengan tanggungan malu yang begitu besar dari mereka. Berikut kutipannya.

“Mereka ingin pulang. Tak ada fasilitas. Tak ada uang. Tak ada pelindung. Tak ada kenalan. Di luar negeri. Tetapi banyak juga, walau pun ingin pulang, merasa menanggung beban moral yang berat, merasa telah tercemar, dan tak sampai hati mencemari nama keluarga” (Toer, 2001: 39)

Dari contoh kutipan di atas tergambar jelas mengenai tokoh perempuan yang mengalami beban moral yang sangat berat. Begitu banyak hal yang membuat mereka malu, salah satunya mereka tidak ingin mencemari nama baik keluarganya. Meskipun keinginannya kuat untuk kembali ke pelukan keluarga, namun karena tidak adanya fasilitas khususnya uang, mereka pun

enggan kembali. Hal itu merupakan pilihan satu-satunya yang harus mereka tanggung sebagai wujud beban moral yang dialami.

Selain itu, karena merasa malu para tokoh perempuan tersebut hanya menitipkan sembah sungkem kepada orang tuanya seperti yang dilakukan oleh tokoh Sumiyati pada kutipan berikut:

“Nah, tentunya kalian dapat memahami mengapa Sumiyati menitipkan sembah-sungkem pada orang tuanya. Mengapa tidak langsung berkirim surat? Bukankah Sumiyati tahu alamat keluarganya? Beban morallah yang menghalanginya berhubungan langsung dengan keluarga. Maka hubungan keluarga menjadi putus. Mereka menjadi buangan yang seakan tidak punya masa lalu lagi” (Toer, 2001:40)

Kutipan di atas menjelaskan mengenai tokoh Sumiyati yang hanya menitipkan sembah sungkem kepada orang tuanya. Hal tersebut disebabkan oleh beban moral yang begitu besar sehingga untuk sekedar mengirimkan surat kepada keluarganya pun terhalangi. Padahal, perasaan tokoh Sumiyati tentunya ingin bertemu langsung dengan kedua orang tuanya. Namun, kejadian yang menimpanya mematahkan segala keinginan tersebut. Terlebih dengan keadaannya yang sekarang merupakan bekas budak seks para serdadu Jepang. Dampaknya pun menjadikan hubungan keluarga putus sama sekali.

Begitu pun ketika para tokoh perempuan tersebut berada di Pulau Buru sebagai korban buangan. Keinginnya untuk kembali ke kampung halamannya semakin tidak memungkinkan. Bukan hanya karena malu pada keluarganya di kampung melainkan keadaannya semakin terjepit selama hidup bersama dengan laki-laki suku Alfuru. Berikut kutipannya.

“Apa tidak ingin pulang ke Jawa?” mereka menyatakan tidak ada keinginan atau pun harapan untuk itu, karena mereka malu pada keluarga, pada teman-teman”(Toer, 2001: 46)

Kutipan di atas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa para tokoh perempuan malu untuk kembali ke kampungnya di Jawa bahkan mereka menyatakan tidak lagi memiliki keinginan dan harapan untuk itu. Hal itu disebabkan oleh pengaruh beban moral yang dirasakan tokoh perempuan. Budak seks yang melekat pada diri mereka yang membuat harapan untuk pulang ke kampung halaman sirna begitu saja.

Sedikit berbeda dengan tokoh Kartini yang ditemui oleh A.L. Soeprihono Koeswadi, seperti pada kutipan berikut:

“Sampai di situ Kartini bercerita. Suaminya telah datang. Itu bukan berarti bukan saja ia tak dibenarkan bicara bahasa Jawa, juga tidak dibenarkan bicara tentang dirinya. A.L. Soeprihono Koeswadi dalam catatannya meneruskan, pada suatu kesempatan pendek ia memerlukan bertanya apakah ia tidak ingin pulang ke Jawa. “Memang ada kemauan sahaya, tapi... dan sahaya rindu pada ibu, bapak, dan kakak sahaya, tapi...” (Toer, 2001:63)

Tokoh Kartini menyatakan keinginannya untuk pulang ke pangkuan keluarganya, namun semasa hidupnya dengan laki-laki dari suku Alfuru tersebut, ia semakin tak memiliki harapan itu. Kondisi tertekan sebagai budak seks dan harus diperhadapkan dengan adat dan tradisi Pulau Buru yang begitu kental menjadi penghalang terbesarnya untuk pulang. Terutama adat di suku Alfuru tersebut yang selalu mengawal dan tidak akan membiarkan istri mereka bersentuhan dengan dunia luar kecuali dengan suku Alfuru.

Beban moral sebagai dampak dari ketidakadilan gender yang terdapat dalam novel tersebut, terdapat pula pada realitas sosial. Seperti pada artikel di bawah ini.

“Setelah perang Asia Pasifik usai, *jugun ianfu* yang masih hidup didera perasaan malu untuk pulang ke kampung halaman. Mereka memilih hidup di tempat lain dan mengunci masa lalu yang kelam dengan berdiam dan mengucilkan diri. Hidup dalam kemiskinan ekonomi dan disingkirkan masyarakat. Mengalami, penderitaan fisik menanggung rasa malu dan perasaan tak berharga hingga akhir hidupnya” (Arkasuta, 14/1/2013)

Tampak dengan jelas beban moral yang dialami oleh para perempuan atau *jugun ianfu* pada masa itu. Mereka menanggung malu atas penderitaan yang dialaminya. Mereka memilih hidup berdiam diri dan mengucilkan dirinya. Keinginan untuk kembali ke keluarga hanya impian saja yang tidak pernah terealisasi. Perasaan yang dialami perempuan itu merupakan wujud beban moral yang sangat berat.

Begitu pun dengan yang dialami oleh Mimin Sukartin, dengan wawancaranya dengan Anna Mariana (30 Juni 2009) dalam salah satu artikel, ia mengaku malu untuk kembali ke kampung halamannya. Berikut jawaban Mimin Sukartin.

“Ibu tak tahu harus bagaiman lagi, ibu sangat malu. Ya bagaimana lagi... sangat sedih (nangis, ... mata menerawang, suara terbata-bata. Seperti biasa, (waktu itu), setelah mengaji, bapak ada, ia sudah sholat Isya. Kalau ingat pada waktu itu ... Ibu sudah tak berani pulang kampung, ibu merasa malu, dipermalukan...”

Beban moral yang dialami Mimin Sukartin merupakan bukti nyata dampak ketidakadilan gender yang dialami perempuan Indonesia khususnya pada masa pendudukan Jepang. Segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh para

serdadu Jepang terhadap dirinya adalah perampasan total segala impian dan harapan Mimin. Ia merasa dipermalukan, harga diri pun telah lenyap sehingga keinginan untuk pulang semakin pupus.

Tidak hanya yang dialami oleh Mimin Sukartin, seorang mantan *jugun ianfu* yang bernama Sumiati dan Muka Lomi pun merasakan hal yang sama seperti yang terlihat dalam kutipan berikut ini.

“Lewat penelusuran jejak oleh Peter Rohi, ditemukan setidaknya ada empat orang jejak *jugun ianfu* di Pulau Buru yang berhasil didapat. *Pertama*, ada seorang *jugun ianfu* bernama Muka Lomi, dari narasumber ini tidak terlampaui banyak diperoleh keterangan karena beliau ternyata telah berada di bawah sumpah dari suku pribumi yang memintanya agar membuang jauh-jauh ingatan masa lalunya.”

*Kedua*, ada mantan *jugun ianfu* bernama NyaSengker yang bernama asli Sumiati, ia adalah *jugun ianfu* yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Namun ketika NyaSengker hendak diberi kesempatan untuk dapat kembali melihat tanah kelahirannya di Semarang, para keluarganya di Pulau Buru tidak memperbolehkan dia pergi [...]” (Aditama, 2011)

Kutipan di atas menjelaskan mengenai hasil penelitian dari Peter Rohi di Pulau Buru mengenai *jugun ianfu*. Dijelaskan oleh Peter bahwa NyaSengker atau Sumiati mengalami beban moral yang cukup berat. Hal tersebut dapat dilihat dari keinginan Sumiati yang ingin pulang kampung terhalang oleh larangan dari keluarganya di Pulau Buru. Larangan tersebut berlaku baginya sebagai ketentuan adat yang harus dipenuhi di Pulau Buru.

Ketidakadilan gender yang dialami para *jugun ianfu* tersebut seperti yang telah disebutkan sebelumnya berdampak pada beban moral yang dipikulnya. Beban moral yang berupa rasa malu, bahkan perasaan takut untuk meninggalkan keluarga baru pun menjadikan beban yang harus dipikul mereka

karena telah memilih hidup dengan penduduk pribumi yang jauh dari impian mereka. Bahkan seperti yang dialami oleh Muka Lomi yang telah disumpah adat agar tidak mengingat masa lalunya lagi merupakan beban moral yang harus diterimanya atau merupakan konsekuensi dari segala hal yang menimpa dirinya.

Tidak ada pilihan lain yang bisa membantu para perempuan tersebut. Sebagai korban budak seks, beban moral yang ditanggung sebagai mantan pemuas nafsu itu mematahkan harapan untuk berkumpul lagi dengan sanak saudara mereka. Pada akhirnya, mereka terjerumus ke dalam masyarakat primitif dan terbelakang peradabannya, sehingga mereka harus mengalami nasib yang buruk hidup dengan tawanan para lelaki dengan budaya patriarkinya.

Fakta imajiner dan fakta sosial tersebut memiliki keterkaitan mengenai dampak dari ketidakadilan gender tersebut khususnya beban moral yang dialami oleh para perempuan. Peristiwa yang menimpa para perempuan tersebut baik dalam novel maupun dalam realitas sosial menunjukkan sebuah kenyataan bahwa perbedaan peran gender yang melahirkan ketidakadilan gender tersebut membawa dampak yang besar berupa beban moral terhadap kehidupan para perempuan khususnya.

Berangkat dari fakta imajiner dari novel PRCM tersebut secara eksplisit pengarang menampilkan beban moral sebagai dampak yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan tokoh-tokoh perempuan. Perasaan malu untuk bertemu dengan keluarga merupakan bukti nyata dalam novel tersebut



sebagai dampak awal yang akan dialami oleh para tokoh perempuan atas ketidakadilan gender yang dialaminya.

Adanya perbedaan biologis dan anggapan negatif akibat konstruksi sosial terhadap perempuan tersebut menjadi pemicu ketidakadilan gender yang menimbulkan dampak seperti beban moral. Hal tersebut sepaham dengan paham feminis sosialis yang menyatakan bahwa ketidakadilan terhadap perempuan tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi lebih disebabkan oleh penilaian dan anggapan akibat konstruksi sosial terhadap perempuan tersebut. Jadi, kekerasan yang dialami oleh tokoh perempuan terjadi karena adanya perbedaan biologis yang membuat penilaian atau anggapan bahwa perempuan dengan berbagai pelabelan negatif yang dimilikinya memungkinkan dirinya mengalami diskriminasi.

Berangkat dari hal tersebut, kekerasan yang dialaminya seperti pada masa pendudukan Jepang maupun ketika menjadi buangan di Pulau Buru menimbulkan beban moral bagi para perempuan. Namun, para perempuan baik dalam novel maupun pada realitas sosial harusnya berani memerangi hal tersebut sesuai dengan paham feminisme sosialis. Lalu, menunjukkan bahwa perempuan layak mendapatkan posisi yang sama dengan laki-laki dan layak mendapatkan pendidikan.

## **2. Beban Psikologis (Mental)**

Selain beban moral, para tokoh perempuan yang mengalami ketidakadilan gender pun mengalami beban psikologis. Beban psikologis merupakan beban mental yang membuat orang tidak mampu menerima suatu hal dengan ikhlas.

Bahkan beban psikologis dapat membuat orang tertekan hingga meninggalkan trauma yang mendalam bahkan sering dengan jalan mengakhiri hidup. Berikut contoh kutipannya.

“Ada yang sudah mulai menangis. Ada yang mencoba bunuh diri, tapi berhasil dicegah oleh teman-temannya” (Toer, 2001: 30)

Kutipan di atas merupakan salah satu bentuk beban psikologis yang dialami oleh salah seorang tokoh perempuan. Ketidaksanggupan dalam menjalani nasibnya itu, membuat dia tertekan dan mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Dengan jalan seperti itu, tidak akan ada tekanan jiwa dan batin yang ia alami.

Kondisi tertekan seperti itu dialami oleh salah satu tokoh perempuan yang bernama Sutinah. Ia merasa tertekan dengan harga dirinya yang direndahkan. Janji-janji Jepang untuk menyekolahkan bersama dengan teman perempuannya yang lain berujung pada perbudakan seks. Sutinah sendiri diberi tugas melayani para serdadu Jepang di kawasan Pulau Buru seperti yang digambarkan dalam kutipan di bawah ini.

“Sutinah meriwayatkan kisahnya mengapa ia sampai di Pulau Buru. Ia telah ditipu oleh Jepang, yang katanya akan menyekolahkan gadis-gadis Indonesia ke Jepang. Ternyata ia dibawa ke Buru untuk dijadikan pelacur guna melayani serdadu Jepang di kawasan Maluku, khususnya Buru. Ia ditempatkan di Namlea, dan merasa tertekan oleh harga diri yang direndahkan.” (Toer, 2001:48)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Sutinah hanya melayani nafsu bejat para serdadu Jepang di Pulau Buru. Ketidaksanggupan melawan segala bentuk diskriminasi para serdadu Jepang membuat para tokoh perempuan itu harus menjalani tekanan yang berat, sehingga kondisi fisik

yang dipermainkan sebagai binatang membuatnya merasa direndahkan. Trauma pun harus dialami dan tidak ada yang mampu mengobati hal tersebut.

Selain itu, penderitaan yang berdampak pada beban psikologis para perempuan tersebut karena mereka tidak mendapat pelayanan dan perlindungan hukum. Berikut kutipannya.

“Tentu kalian tidak dapat merasakan bagaimana berlarut penderitaan mereka: setelah dianiaya oleh Jepang kemudian tidak mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum. Sungguh memedihkan” (Toer, 2001: 36)

Tidak adanya pelayanan dan perlindungan hukum semakin menambah beban psikologis perempuan dalam novel tersebut. Penderitaannya setelah mereka dianiaya oleh serdadu Jepang ternyata tidak diindahkan di mata hukum. Penderitaan dan kepedihan yang dialami kembali diserahkan kepada naluri hidup masing-masing. Hal tersebut membuat para perempuan semakin tertekan bahwa penderitaan yang mereka alami tidak akan pernah menyentuh ranah hukum dan secara langsung mereka semakin dimarginalkan.

Rasa trauma yang dialami oleh para tokoh perempuan tersebut berimbas pula pada ketidakinginan mereka untuk kembali ke kampung halamannya karena merasa dendam kepada orang tuanya. Seperti yang dijelaskan dalam kutipan berikut:

“Dapat diduga bahwa di antara sekian banyak buangan ada yang memang menemukan keberuntungan dalam hidup. Kendati demikian, ia atau mereka tetap tidak menghubungi keluarganya, bukan saja telah menjadi haknya tetapi dapat juga bersumber pada protes atau dendam kepada orang tuanya sendiri, yang menyerahkannya pada kebuasan Jepang” (Toer, 2001:41)

Dari kutipan di atas secara eksplisit menggambarkan bahwa di antara para tokoh perempuan tersebut ada yang menemukan keberuntungan dalam hidupnya namun mereka tetap tidak menghubungi sanak saudara atau keluarganya. Hal tersebut bersumber dari protes mereka yang berwujud dendam kepada kedua orang tuanya sendiri ketika mereka diserahkan kepada para serdadu Jepang untuk dijadikan budak seks. “Protes atau dendam” di sini mengesankan adanya beban psikologis yang dialami oleh para tokoh perempuan tersebut. Para tokoh perempuan tersebut berharap mendapatkan pembelaan dari orang tua mereka dan hukum negara, namun justru semakin menambah daftar trauma yang dialami oleh mereka.

Tidak hanya itu, keberadaan para tokoh perempuan yang dijadikan budak seks di Pulau Buru pun mengalami beban psikologis dengan kondisi lingkungan tersebut. Berikut kutipannya.

“Kalau sampean nanti pulang, tolong ajak saya, bawa saya ini. Saya akan berterima kasih kalau sampean bisa bawa saya keluar dari daerah ini. Saya sudah cukup lama disiksa oleh keadaan, sementara saya tidak tahu jalan keluar.” (Toer, 2001:50)

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat dilihat penderitaan yang dialami oleh tokoh Sulastri yang diceritakan kepada salah seorang tapol di Pulau Buru. Ia ingin kembali ke kampung halamannya dan meninggalkan Pulau Buru tersebut. Ia tersiksa oleh keadaan dan tidak tahu arah jalan keluar. Hal tersebut menyebabkan beban psikologis yang sangat lama dialami oleh Sulastri. Kondisi suku Alfuru di Pulau Buru yang masih primitif tersebut membuatnya

mengalami tekanan batin dan jiwa. Ia harus mengalami beratnya kehidupan dengan suku primitif dengan segala peraturan-peraturan yang mengekanginya.

Kondisi trauma yang begitu berat dialami oleh tokoh Ibu Muka Jawa. Ia menuturkan bahwa tidak akan mengungkap lagi kejadian masa lalu yang menyimpannya. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut:

“Jangan Anak pikirkan ibu lagi. Ibu sudah bisa hidup begini. Dan jangan Anak naik lagi. Percuma. Ibu sudah bertekad untuk tidak mengungkap itu lagi.” (Toer, 2001:95)

Ibu Muka Jawa mengungkapkan kesiapannya menjalani kehidupannya bersama Suku Alfuru. Ia tidak ingin lagi mengungkap penderitaan yang dialaminya ketika menjadi budak seks. Ia merasa semua masa kelam itu harus ditutup rapat-rapat karena hanya meninggalkan bekas yang mendalam, meskipun kehidupannya dengan suku Alfuru tidak jauh berbeda yaitu tidak menjanjikan kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia. Hal itu mengesankan bahwa tokoh Ibu Muka Jawa mengalami beban psikologis yang berat sehingga tidak bertekad untuk mengungkap ketidakadilan yang dialaminya.

Hal tersebut terjadi pula pada realitas sosial masyarakat. Kehidupan perempuan yang merupakan mantan *jugun ianfu* tersebut mengalami beban psikologis yang berat. Seperti yang terlihat pada kutipan artikel berikut ini.

“...Sarmi yakin bahwa dia sangat berdosa karena dia membiarkan Jepang memperkosanya. Selain Sarmi ada juga *jugun ianfu* yang tidak dapat mempunyai anak. Malu, segan dan trauma membuat banyak *jugun ianfu* enggan diwawancarai di rumah sendiri oleh penulis buku ini. Takut akan reaksi tetangga mereka hanya mau diwawancara di tempat lain” (Kusmiati, 2013)

Beban psikologis yang dialami para perempuan Indonesia pada masa pendudukan Jepang, dapat dilihat pada kutipan artikel di atas. Mereka takut diwawancarai karena trauma mendalam yang dialami dan dirasakan. Adanya stigma negatif oleh masyarakat sebagai “bekas Jepang” membuat mereka mengalami tekanan psikis.

Selain itu, para perempuan Indonesia tidak mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia sendiri. Apalagi pemerintah Jepang yang tidak pernah mengakui keberadaan *jugun ianfu* tersebut. Hal tersebut semakin menjadikan para perempuan tersebut mengalami tekanan psikologis yang berat, berikut kutipannya.

“Hingga saat ini, kehidupan korban Jugun Ianfu tetap menderita. Selain karena tekanan psikis dan stigma negatif yang diberikan masyarakat sebagai “bekas Jepang”, mereka juga tidak mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia sendiri. Hanya yayasan-yayasan yang memberikan perhatian khusus saja yang mencoba untuk memperjuangkan nasib para korban Jugun Ianfu dan permohonan maaf secara resmi dari pemerintah Jepang yang sampai saat ini tidak mau mengakui keberadaan Jugun Ianfu” (Arkasuta, 2013)

Segala bentuk ketidakadilan gender yang dialami perempuan dan kurangnya perhatian serta tanggung jawab pemerintah terhadap kondisi mereka yang dijadikan budak seks, semakin menambah penderitaan panjang dan tekanan kejiwaan berupa trauma bagi para perempuan. Artikel di atas jelas menggambarkan ketidakpekaan pemerintah Indonesia bahkan ketidakinginan pemerintah untuk mengetahui persoalan perempuan tersebut. Para perempuan pun merasa termarginalkan, tersubordinasi, dan tidak diperjuangkan hak-haknya.

Beban psikologis yang dialami oleh para perempuan tersebut membuat sebagian dari mereka bunuh diri. Berikut kutipannya dalam salah satu artikel.

“Kasus lain menyatakan bahwa mereka diperkosa dan disiksa secara kejam. Dipaksa melayani kebutuhan seksual tentara Jepang sebanyak 10 hingga 20 orang siang dan malam serta dibiarkan kelaparan. Kemudian diaborsi secara paksa apabila hamil. Banyak perempuan yang mati dalam *lanjo* karena sakit, bunuh diri atau disiksa sampai mati” (Arkasuta, 14/11/2013)

Ketidakadilan yang dialami oleh para perempuan tersebut mengakibatkan tindakan bunuh diri menjadi salah satu jalan yang mereka pilih untuk lepas dari tekanan jiwa dan batin yang menderanya. Kekerasan-kekeraan seksual yang mereka alami sangat berpengaruh terhadap kondisi jiwa dan fisiknya. Seperti yang dijelaskan oleh Arkasuta (2013) dalam artikelnya bahwa kebanyakan dari mereka hidup dengan perasaan menanggung malu. Hal itu berdampak pada perempuan tidak hanya penderitaan secara fisik saja tetapi juga secara psikis karena ada sebagian dari mereka yang tidak bisa lagi mendapatkan keturunan yang disebabkan oleh kerusakan pada rahim bahkan ada yang menderita penyakit tertentu.

Fakta imajiner yang menggambarkan dampak beban psikologis tersebut berkaitan pula dengan realitas masyarakat. Pada novel PRCM pengarang secara eksplisit menampilkan bentuk-bentuk ketidakadilan gender bagi para tokoh perempuan yang berujung pada beban psikologis yang berat. Beban psikologis yang dialami oleh tokoh perempuan tersebut bahkan berujung pada bunuh diri karena ketidakmampuan dalam menghadapinya. Hal tersebut pun relevan dengan fakta sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Seperti halnya dengan beban moral sebelumnya. Beban psikologis sebagai dampak dari ketidakadilan gender tentunya sepaham dengan feminisme sosialis. Bagi kaum feminisme sosialis, segala bentuk diskriminasi dan dominasi terhadap perempuan merupakan bentuk ketidakadilan gender yang harus diperangi. Meskipun, ketidakadilan gender yang dialami perempuan disebabkan karena perbedaan biologis dan akibat dari konstruksi sosial masyarakat mengenai perbedaan tersebut, para perempuan harus berusaha dari keluar kungkungan tersebut.

Menurut Sundari (dalam Zulfaira, 2011), bagi feminis sosialis untuk mencapai sebuah kondisi keadilan bagi perempuan harus melalui pemberdayaan sehingga mereka mampu mengubah situasi kehidupannya. Tidak hanya itu, dengan membentuk perundang-undangan yang menjamin perolehan hak bagi kaum perempuan merupakan salah satu langkah agar perempuan dengan adil mencapai posisi yang baik.

### **3. Hancurnya Idealisme**

Hancurnya idealisme diartikan sebagai hancurnya sebuah angan dan cita-cita yang melekat dari kecil bagi seseorang. Berikut kutipan yang menguraikan hancurnya idealisme tokoh perempuan dalam novel tersebut.

“...mereka dengan semau sendiri dan di bawah kesaksian umum telah menjadi gundik Jepang. Waktu Jepang kalah mereka pun tidak jelas lagi kabar beritanya. Tetapi itu adalah risiko dari kehidupan yang telah dipilih sendiri” (Toer, 2001: 19)

Pada kutipan di atas tampak kepasrahan tokoh perempuan dalam menerima nasibnya. Cita-cita mulia mereka tidak dapat diidamkan lagi. Hal



tersebut merupakan pukulan berat ketika cita-cita harus dipertukarkan dengan perbuatan dan penderitaan terus menerus. Idealisme untuk menjadi seorang pemimpin pun hilang seketika. Seperti yang tertuang dalam kutipan berikut.

“salah seorang di antara mereka menceritakan pada Makhudum Sati bahwa lepas 1,5 mil dari pelabuhan, para perwira Jepang serentak melakukan serbuan terhadap para perawan itu, memperkosa dan menghancurkan idealisme menjadi pemimpin di kemudian hari” (Toer, 2001: 31)

Perlakuan serdadu Jepang terhadap perempuan sungguh menghancurkan idealisme mereka untuk menjadi pemimpin. Bentuk kekerasan yang dialami para tokoh perempuan tersebut terus menjadi momok yang menakutkan. Beban perempuan pun semakin banyak, menanggung rasa malu dan dihancurkannya cita-cita mulia mereka.

Hal di atas tergambar pula pada kutipan di bawah ini yang menggambarkan penderitaan para tokoh perempuan hingga kehilangan segala-galanya.

“Mereka digiring turun-naik gunung-gemunung untuk kemudian dimasukkan ke dalam perut benteng bawah tanah yang terletak di kaki Gunung Pala(t)mada. Di sini para gadis remaja tanpa pengalaman itu diserahkan pada keganasan serdadu-serdadu Dai Nippon. Tak seorang pun yang dapat menolong mereka. Di sini pula mereka kehilangan segala-galanya: kehormatan, cita-cita, harga diri, hubungan dengan dunia luar, peradaban dan kebudayaan -suatu perampasan total” (Toer, 2001: 52-53)

Ketidakadilan gender yang dialami para tokoh perempuan tersebut membawa dampak hingga pada hancurnya idealisme mereka. Tidak ada pertolongan untuk mereka. Kehormatan, cita-cita, harga diri, hubungan dengan dunia luar serta peradaban dan kebudayaan menjadi satu dalam perampasan total yang dilakukan para serdadu Jepang terhadap para tokoh

perempuan tersebut. Cita-cita yang dahulu mereka impikan justru hancur ditelan oleh keganasan para serdadu Jepang. Hal itu berdampak pula pada kondisi mental mereka yang tidak bisa lagi mempertahankan idealismenya.

Tokoh Polli juga menggambarkan kesedihannya ketika menemukan tokoh Ibu Rida yang tidak berdaya. Tokoh Polli mengemukakan kekesalannya terhadap para serdadu Jepang dan mempertanyakan dalam hati mengenai derita yang dialami tokoh Ibu Rida. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan di bawah ini.

“Kedua lututnya yang menjadi tumpuan kedua tangan yang menutupi wajahnya yang keriput itu gemetar. Tubuhnya menggigil. Aku belum yakin apakah itu karena sakitnya atau karena pertanyaanku. Hanya dalam hati aku bisa berseru-seru: “Mengapa kau diam saja Ibu, Ibu? Lihatlah, ini aku datang menjengukmu. Apa aku bisa berbuat untukmu? Betapa sengsara hidupmu. Kau pergi meninggalkan kampung halaman dan keluarga untuk belajar, untuk bisa mengabdikan lebih baik pada nusa dan bangsa dan untuk dirimu sendiri. Keberangkatanmu direstui dan didoakan selamat oleh orang tuamu. Dan kau fasis Jepang, kau telah menganiaya, memperkosanya, merusak semua harapan indahmu. Kau jatuh ke tangan orang-orang gunung ini, yang mengenalmu hanya sebagai wanita dan harta” (Toer, 2001: 204-205)

Dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa isi hati tokoh Polli tersebut mengesankan bahwa derita yang dialami oleh tokoh Ibu Rida menghancurkan segala harapan indahmu. Harapan tokoh Ibu Rida bisa mengabdikan lebih baik kepada tanah air pupus begitu saja. Semua telah dirampas oleh kejamnya para serdadu-serdadu Jepang yang bertindak tidak manusiawi kepada mereka. Terlebih keadaan mereka yang harus hidup dengan suku Alfuru yang mengenalnya layaknya sebuah barang yang dapat dibeli bahkan dipertukarkan. Idealisme mereka hancur seketika. Impian untuk menjadi seseorang yang

mampu mengabdikan bagi negara di bidang pendidikan jatuh seketika termasuk ketika harus berada di tangan suku Alfuru yang masih buas.

Dalam kehidupan sosial masyarakat pun terjadi hal yang sama pada masa pendudukan Jepang. Para *jugun ianfu* direkrut dengan cara pemaksaan (diambil begitu saja di jalan atau di rumah mereka), diiming-imingi untuk sekolah di luar negeri, atau akan dijadikan pemain sandiwara (Shahab, 2009). Namun, kenyataan yang terjadi para perempuan tersebut justru dijadikan budak seks. Hal itu menjadi bukti hancurnya idealisme para perempuan tersebut.

Propaganda memberi iming-iming tentang mendapat pekerjaan ataupun pendidikan, tidak pernah dilakukan secara terbuka melalui media-media komunikasi massa seperti surat kabar atau radio, akan tetapi seperti halnya desas desus yang melambung dari mulut ke mulut. Korban-korban yang tertipu menjadi *jugun ianfu* umumnya anak perempuan yang masih di bawah umur dan gadis. Tetapi ada juga sebagian yang sudah berkeluarga. Mereka juga kebanyakan perempuan yang berpendidikan rendah, bahkan tidak berpendidikan dan buta huruf. Kesulitan ekonomi kerap menjadi alasan utama mereka yang tertipu (Ngawur, 2013)

Berangkat dari hal tersebut dapat dilihat bahwa Jepang dengan segala propaganda yang dilakukannya mampu membuat para perempuan Indonesia tertipu. Keinginan para perempuan untuk bersekolah di luar negeri hanyalah janji-janji manis. Padahal, para perempuan tersebut hanya dijadikan wanita penghibur. Hal tersebut secara implisit menggambarkan para perempuan yang

kecewa dan pasrah dengan keadaan yang dialaminya, sehingga secara langsung idealisme mereka hilang begitu saja.

Para perempuan tersebut, pada awalnya berharap dapat memberikan yang terbaik kepada keluarganya apalagi dengan kesulitan ekonomi yang dialaminya. Seperti pengakuan dari mantan *jugun ianfu* yaitu Lasiyem dalam artikel di bawah ini.

“... yang ada dalam pikiran saya adalah bagaimana bisa kerja. Saya ingin membelikan makanan untuk anak saya... karena itu ketika ada tawaran kerja saya langsung sanggup, ...saya tidak bilang dengan suami saya” (Poeponegoro dan Notosusanto dalam Ngawur: 2013)

Jelas tergambar dalam kutipan di atas bahwa Ibu Lasiyem ikhlas merelakan dirinya menerima tawaran Jepang tersebut demi kelangsungan kebutuhan ekonomi keluarganya. Apalagi pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, kelangsungan ekonomi di Indonesia begitu buruk. Tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh. Meski pada akhirnya hal tersebut membawa Ibu Lasiyem ke jurang penderitaan.

Dampak hancurnya idealisme para tokoh perempuan yang ada dalam novel memiliki kaitan dengan fakta sosial yang ada dalam masyarakat. Bagi pengarang, penjajahan Jepang di Indonesia sudah menjadi langkah awal yang menjerumuskan para tokoh perempuan dalam mengharapkan cita-citanya. Secara langsung ditampilkan pengarang para tokoh perempuan tersebut kehilangan idealisme mereka menjadi pemimpin untuk bangsa dan negara. Begitu pun yang terjadi dalam kenyataan sosial. Ketidakadilan gender yang dialami kaum perempuan khususnya ketika penjajahan Jepang membawa

dampak yang berat hingga menghancurkan idealisme para perempuan tersebut.

Timbulnya dampak demikian disebabkan oleh belum adanya kaum perempuan baik yang digambarkan dalam novel maupun dalam realitas masyarakat berusaha keluar dari ketidakadilan yang dialami. Sikap pasrah dalam menerima segala hal yang ditimpanya semakin melanggengkan ketidakadilan yang berujung pada dampak negatif untuk mereka.

Melawan segala bentuk visi dan konstruksi sosial masyarakat yang dibangun atas bias gender harusnya merupakan usaha yang dilakukan oleh kaum perempuan. Sebab bagi feminisme sosialis, konstruksi sosial sebagai sumber ketidakadilan terhadap perempuan termasuk di dalamnya stereotipe-stereotype yang dilekatkan kepadanya. Maka dari itu, feminis sosialis selalu berusaha melakukan kritik terhadap eksploitasi kelas dari sistem kapitalisme secara bersamaan dengan kritik ketidakadilan gender yang mengakibatkan dominasi, subordinasi, dan marginalisasi atas kaum perempuan (Fakih, 2012: 90).

#### **4. Kemerosotan peradaban dan kebudayaan**

Dalam KBBI (2012:7), peradaban adalah kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) sedangkan kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian dan adat. Jadi, kemerosotan peradaban dan kebudayaan dimaksudkan bahwa semakin menurunnya peradaban dan kebudayaan ketika seseorang berada pada

peradaban modern harus diperhadapkan dengan budaya dan peradaban lama. Hal itulah yang dialami oleh para tokoh perempuan, mereka harus mengalami kemerosotan peradaban dan kebudayaan. Berikut kutipannya.

“Jepang kalah, dan mereka membubarkan diri begitu saja. Masing-masing terpaksa mencari hidup sekenakananya. Ia sendiri mencemplungkan diri ke dalam kehidupan pribumi setempat dalam ikatan soa. Di sini masa mudanya hilang selama-lamanya, mengalami kemerosotan peradaban dan kebudayaan di tengah-tengah suku pemburu Alfuru yang masih primitif dan setengah nomad.” (Toer, 2001: 50)

Para tokoh perempuan dalam novel tersebut digambarkan mengalami kemerosotan peradaban dan kebudayaan. Hal itu disebabkan oleh suku Alfuru yang masih primitif. Suku Alfuru masih terkenal buas dan sangat kental adat istiadat dan tradisi. Para tokoh perempuan pun harus hidup di bawah aturan yang mengungkungnya. Kehidupan demikian semakin menambah daftar panjang penderitaan perempuan.

Ketika mereka terjerumus ke dalam peradaban seperti itu, tak ada seorang pun yang dapat menolong. Adat istiadat suku Alfuru begitu keras, sehingga dengan keadaan terpaksa para tokoh perempuan semakin merosot peradaban dan kebudayaannya. Seperti yang tergambar pada kutipan di bawah ini.

“...tak seorang pun yang dapat menolong mereka. Di sini pula mereka kehilangan segala-galanya: kehormatan, cita-cita, harga diri, hubungan dengan dunia luar, peradaban dan kebudayaan-suatu perampasan total” (Toer, 2001: 53)

Para tokoh perempuan digambarkan kehilangan segala-galanya baik itu kehormatan, harga diri dan cita-cita. Dengan kemerosotan budaya dan peradaban yang dialami semakin membatasi gerak para perempuan untuk

berinteraksi dengan dunia luar. Teutama jika para tokoh perempuan itu menggunakan bahasa lain selain bahasa Buru, mereka akan mendapatkan sanksi adat. Adat istiadat seperti itulah yang akan semakin menyiksa dan membuat mereka menderita bukan sejahtera seperti yang mereka impikan.

Tidak hanya itu, hidup dengan suku Alfuru membuat mereka diserang berbagai penyakit. Seperti dalam contoh kutipan di bawah ini.

“Mereka menjadi tawanan lingkungan hidup sendiri. Syarat hidup yang terlalu berat menyebabkan mereka cepat tua. Dapat diduga, sebagian besar dari mereka telah mati, terutama karena tidak adanya pengobatan dan seringnya wabah serta penyakit parasit, yang menjadi ciri setiap masyarakat terasing, terbelakang, dan mengamuk”(Toer, 2001:66)

Kutipan di atas menggambarkan kehidupan para tokoh perempuan yang banyak meninggal karena tidak adanya pengobatan di pulau tersebut. Hal itu menandakan masyarakat suku Alfuru masih terasing dan terbelakang. Kondisi suku Alfuru yang masih terbelakang semakin membuat para tokoh perempuan mengalami penderitaan yang sangat sulit. Apalagi dengan sikap acuh tak acuh masyarakat itu terhadap pengobatan dokter yang dilakukan oleh para tapol pada masa itu semakin tokoh-tokoh perempuan itu terbelakang.

Kerasnya kehidupan bersama dengan masyarakat suku Alfuru di Pulau Buru dirasakan oleh salah seorang tokoh perempuan dalam novel tersebut yang bernama Muka Ningit. Ia telah berada dalam cengkraman adat gunung yang sangat ketat. Berikut kutipannya.

“Oleh suaminya ia dibawa naik ke kampung suaminya, Wai Kopi. Di sini wanita buangan itu jatuh dalam cengkraman adat gunung yang sangat ketat” (Toer, 2001:92)

Adat suku Alfuru yang begitu ketat tersebut mengakibatkan merosotnya peradaban dan kebudayaan yang dialami oleh para tokoh perempuan yang telah menjadi buangan oleh serdadu Jepang. Kebudayaan terbelakang yang tentunya jauh dari potret kebudayaan mereka sebelum menjadi budak seks dan buangan. Kondisi demikian tentunya menambah beban moral dan psikologis tokoh perempuan. Keganasan cengkeraman adat semakin memarginalkan diri mereka. Seperti yang dialami oleh tokoh Nait yang mendapat kecaman dari kepala sukunya karena berbicara tidak dengan bahasa Buru. Berikut yang tergambar dalam kutipan berikut ini.

“Dan Kau, nait,” tangan orang tua itu terangkat menuding pada wanita di samping tubuhnya. “Kau perempuan sudah langgar, salah adat. Kau bicara bukan dalam bahasa nenek-moyang. Siapa sudah ajari kau melanggar sumpah adat?” (Toer, 2001:155)

Kutipan tersebut menggambarkan tokoh Nait yang telah dianggap melanggar sumpah masyarakat suku Alfuru. Bagi masyarakat suku Alfuru, mereka tidak boleh menggunakan bahasa lain kecuali bahasa Buru dan mereka berjanji akan hal itu melalui sumpah. Maka dikenallah istilah *pamali* bagi mereka. Jika mereka melanggar, berarti mereka harus dihukum sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.

Kondisi seperti itulah yang dialami oleh para tokoh perempuan tersebut yang harus disumpah adat hingga harus menyangkal diri, asal kebudayaan dan peradabannya sendiri. Berikut kutipannya.

“Kami telah menemukan wanita yang kami cari itu. Benar sekali, ibu itu tidak bisa diajak bicara. Kami dapat memahami. Ia terikat pada sumpah Buru. Sampai hari tuanya, tanpa sesuatu harapan pun kecuali mati, ia tetap setia pada sumpahnya; sumpah untuk menyangkal diri, asal kebudayaan, dan peradaban sendiri.



Sumbernya tetap sama: malu kembali pada keluarga.”(Toer, 2001:205)

Begitu jelas dalam kutipan tersebut kesan ganas yang dilakukan oleh suku Alfuru terhadap para tokoh perempuan. Mereka harus menyangkal diri, kebudayaan, dan peradaban yang sebelumnya. Apalagi mereka tidak memiliki daya untuk menolak hal tersebut dengan kondisi kehidupan yang semakin tertekan. Demi mencari sebuah kehidupan setelah penderitaan dari para serdadu Jepang, mereka memilih menjadi tawanan. Mereka hidup sebagai istri yang patuh dengan budaya terbelakang tersebut daripada hidup tidak jelas dan tidak mendapat perlindungan dari keluarga khususnya negara.

Hal serupa terjadi pada realitas masyarakat, para perempuan mengalami kemerosotan peradaban dan kebudayaan. Seperti pada artikel yang ditulis oleh Aditama (2012), bahwa dari berbagai keterangan, Rohi mendapat informasi bahwa setelah keberadaan Jepang yang makin terdesak di Pulau Buru akibat serbuan Sekutu, para *jugun ianfu* mereka bawa untuk memasuki hutan-hutan di pedalaman. Dari situlah lantas banyak dari *jugun ianfu* ini yang kemudian diculik oleh suku-suku pedalaman yang menghuni Pulau Buru. Mereka pada akhirnya secara terpaksa dikawini oleh para kepala suku atau pun penduduk pribumi Pulau Buru yang lain. Dari laporan Peter Rohi, diperoleh simpulan bahwa pada umumnya para *jugun ianfu* tersebut sampai akhir hayatnya terus berharap melawan keputusan untuk tetap menunggu bahwa akan ada sanak keluarga ataupun pihak lain yang akan membawa mereka kembali ke tanah Jawa.

Dampak demikian dialami oleh salah seorang perempuan bernama Muka Lomi. Muka Lomi pun mengalami kemerosotan kebudayaan dan peradaban karena beliau ternyata telah berada di bawah sumpah dari suku pribumi yang memintanya agar membuang jauh-jauh ingatan masa lalunya. Ia harus taat pada peradaban dan kebudayaan baru yang terbelakang tersebut tanpa suatu pembelaan atau perlawanan.

Dari fakta imajiner dapat dilihat keterkaitannya dengan fakta sosial dalam masyarakat. kemerosotan peradaban dan kebudayaan merupakan salah satu dampak yang dialami oleh tokoh perempuan ketika menjadi buangan di Pulau Buru. Pengarang dalam novel PRCM menggambarkan kehidupan yang teramat berat dihadapi oleh para buangan tersebut. Para tokoh perempuan digambarkan sebagai perempuan yang menanggung beban berat hingga meninggal karena hidup dengan lingkungan terbelakang itu. Dari hal tersebut, dapat dilihat kaum perempuan yang tidak mampu keluar dari keterkungkungan adat dan budaya.

Bagi kaum feminisme sosialis, untuk keluar dari keterkungkungan tersebut, para perempuan harus memerangi penilaian dan anggapan terhadap perbedaan jenis kelamin. Perempuan harus bangkit melawan karena penindasan terhadap perempuan terjadi di semua kelas.

## **5. Hilangnya nilai-nilai kemanusiaan**

Segala bentuk ketidakadilan gender yang terjadi semakin mempertegas bahwa nilai-nilai kemanusiaan semakin tergerus bahkan mulai menghilang.

Perlakuan tidak manusiawi semakin banyak terjadi begitu pun dalam novel PRCM. Ketidakadilan gender menyebabkan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan. Berikut contoh kutipannya.

“Berdasarkan catatan-catatan yang akan disusulkan kemudian, dapat diduga sebagian terbesar para perawan remaja yang diangkut Jepang itu telah mati dalam penderitaan, tanpa disaksikan oleh orang-orang yang dikasihinya, tidak pernah mendapat kesempatan belajar sebagaimana dijanjikan, dan mati di negeri yang jauh. Penderitaan yang mereka alami macam-macam, dan sungguh-sungguh mengguncangkan perasaan kemanusiaan, kecuali bagi serdadu-serdadu Jepang” (Toer, 2001: 18)

Kutipan di atas menggambarkan kekejaman serdadu Jepang terhadap tokoh-tokoh perempuan. Mereka menyiksa secara sadis. Tidak ada rasa kemanusiaan yang ditampakkan para serdadu Jepang. Tidak hanya menderita terus menerus bahkan ada di antara perempuan tersebut mati dan serdadu Jepang tidak merasakan bahwa itu perbuatan tidak manusiawi. Kekejaman serdadu Jepang juga dapat dilihat pada kutipan di bawah ini.

“Berapa persen dari sekian perawan remaja itu yang dapat dan berhasil kembali ke pangkuan keluarga? Sama sekali gelap. Tidak terjawab sebelum pihak Jepang sendiri memberikan angka. Dan justru itulah yang tidak mungkin. Jepang malah hendak menghapuskan semua jejak agar terbebas dari tuduhan melakukan kejahatan perang. Maka begitu kalah, Jepang segera membebaskan remaja itu, dilepaskan tanpa pesangon, tanpa fasilitas” (Toer, 2001: 20)

Para serdadu Jepang dengan kejamnya menghapus jejak kejahatan mereka. Mereka pun membebaskan para perempuan itu tanpa adanya fasilitas dan upah dari pekerjaan yang telah para perempuan itu jalani. Para serdadu Jepang yang memarginalkan tokoh perempuan dalam bidang ekonomi dan sosial seperti itu

merupakan wujud dari ter subordinasinya mereka sehingga nilai-nilai kemanusiaan tidak lagi diindahkan. Ketidakadilan gender yang seperti itu semakin menggerus arti nilai kemanusiaan sendiri.

Selain itu, para tokoh perempuan tersebut tidak mendapat perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia. Seperti yang digambarkan secara eksplisit dalam kutipan berikut:

“Keteledoran itu nampak dari kenyataan tak pernah ada komisi yang ditugaskan untuk menyelesaikan soal ini. Dalam perundingan-perundingan tentang pampasan perang dan pelaksanaannya antara RI dan Jepang, juga hal tersebut tidak disinggung. Dengan demikian, para perawan remaja itu, tanpa suatu pernyataan resmi dari pemerintah, dengan sendirinya menjadi orang buangan. Maksudku, mereka tidak bisa pulang ke pangkuan keluarga dan kampung halamannya, baik masih di dalam atau pun sudah di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Mereka belum atau memang tidak mendapatkan pelayanan perlindungan hukum” (Toer, 2001: 36)

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa mereka tidak pernah mendapatkan jatah dalam setiap pembahasan antara pemerintah RI dan Jepang. Bahkan perlindungan hukum pun tidak didapatkannya. Hal tersebut berdampak bagi para tokoh perempuan tersebut dengan sendirinya menjadi orang buangan. Apalagi para serdadu Jepang menghapus semua jejak kejahatan yang dilakukan terhadap para tokoh perempuan tersebut. Acuh tak acuh pemerintah Indonesia dalam masalah ini merupakan bukti bahwa perempuan memang tidak pernah mendapat porsi dalam ranah publik meskipun itu hanya pembahasan keadilan semata.

Dampak ketidakadilan gender tersebut dialami pula dalam realitas sosial masyarakat yang hidup pada masa pendudukan Jepang. Seperti yang tampak

pada artikel yang menyatakan bahwa mereka diperkosa dan disiksa secara kejam. Dipaksa melayani kebutuhan seksual tentara Jepang sebanyak 10 hingga 20 orang siang dan malam serta dibiarkan kelaparan. Kemudian diaborsi secara paksa apabila hamil. Banyak perempuan mati dalam *lanjo* karena sakit, bunuh diri atau disiksa sampai mati.

Hilangnya nilai-nilai kemanusiaan tergambar jelas pada kutipan di atas. Kalimat “banyak perempuan mati dalam *lanjo* karena sakit, bunuh diri atau disiksa sampai mati”, jelas menggambarkan serdadu Jepang tidak memanusiakan perempuan Indonesia. Terlebih tidak adanya perlawanan dan perlindungan dari pihak keluarga dan negara, bahkan banyak yang mati karena sakit, bunuh diri, dan disiksa sampai mati.

Begitu pun dengan yang dialami oleh Mimin Sukartin dan teman-temannya. Ia harus mengalami penderitaan secara seksual secara brutal dan diperlakukan tidak manusiawi. Seperti yang dijelaskan dalam artikel di bawah ini.

“Semuanya ditempatkan begitu saja tanpa adanya penempatan ruangan khusus dan layak bagi mereka. Para perempuan yang berada di dalam gedung itu mengalami penderitaan fisik maupun psikis. Mereka mengalami eksploitasi seksual secara brutal dan tidak manusiawi” (Mariana, 2011)

Menurut Mariana (2011), para perempuan tersebut tidak diperkenankan untuk keluar rumah. Tidak ada kebebasan dan pemenjaraan diperketat dalam sebuah *lanjo*. Terkadang dikarenakan “tugas” mereka pada aktivitas malam hari yang sangat tak manusiawi, pada akhirnya membuat hubungan para penghuni sangat kaku dan intensitas interaksi yang sekedarnya. Sebagian

besar sikap para penghuni hanya termangu menyesali nasib tanpa bersesapa satu sama lain. Perbincangan yang panjang lebar mengenai asal muasal dan keadaan satu sama lain secara akrab tidak pernah terjadi.

Penderitaan-penderitaan yang dialami oleh para perempuan yang berujung pada hilangnya nilai-nilai kemanusiaan dialami pula oleh Mardiyem salah satu *jugun ianfu* pada masa pendudukan Jepang. Berikut pengungkapan Mardiyem.

“Aku berusaha memberi isyarat dengan gelengan kepala dan tangan kalau tidak mau lagi melayani, dan menunjuk darah yang mulai menetes dari kedua kakiku. Laki-laki Jepang itu tidak mau mengerti. Mereka malah membuka semua bajuku dan dengan buas langsung menerkam. Masing-masing dari mereka memuaskan nafsunya sebanyak dua kali. Mereka tidak merasa kasihan kepadaku meskipun darahku tidak lagi menetes, tetapi mengalir membanjiri sprengel dan kasur.” (Listiyani, 65: 2008)

Pengungkapan secara terang-terangan yang dilakukan oleh Mardiyem tersebut menjadi bukti kekejaman para serdadu Jepang hingga nilai-nilai kemanusiaan tidak berarti lagi. Perasaan iba tidak lagi dimiliki oleh para serdadu Jepang tersebut. Terlebih dengan pelabelan para perempuan sebagai makhluk yang lemah, tidak berdaya, bodoh, dan tunduk semakin melanggengkan kesewenang-wenangan para serdadu Jepang. Pada akhirnya pun, mereka harus mengalami beban yang berat sampai ketika mereka menjadi buangan yang terlupakan oleh bangsa, negara bahkan keluarganya sendiri. Para perempuan pun berada pada posisi yang merugikan dan tidak dianggap lagi sebagai makhluk yang harusnya mendapat posisi setara dengan laki-laki.

Begitulah nilai-nilai kemanusiaan yang semakin tidak diperuntukkan bagi perempuan baik dalam novel maupun dalam realitas sosial. Dalam novel itu sendiri, pengarang secara eksplisit menggambarkan perilaku para serdadu

Jepang yang tidak manusiawi. Para serdadu Jepang tersebut memperlakukan perempuan sewenang-wenang. Hal yang sama terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia ketika Jepang berkuasa. Kebiadaban para serdadu Jepang tidak pernah mendapat kecaman dari pemerintah Indonesia sendiri.

Bagi kaum feminisme sosialis, strategi untuk pemberdayaan perempuan adalah adanya hukum dan peraturan perundang-undangan yang menjamin kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam bidang penghidupan (Sundari dalam Zulfaira, 2011). Jadi, agar perempuan terbebas dari ketidakadilan gender yang dialami, maka perempuan harus dibuatkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keadilan mereka.

Berangkat dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ketidakadilan gender berupa stereotipe, kekerasan, subordinasi, marginalisasi, dan beban kerja akan melahirkan dampak-dampak seperti yang dijelaskan sebelumnya. Para perempuan baik dalam novel maupun dalam kenyataan sosial pun belum ada yang bisa memerangi ketidakadilan gender yang dialami sesuai dengan ide yang diusung oleh feminis sosialis. Hal tersebut dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, ketidakberdayaan untuk melakukan perlawanan, adat dan tradisi yang mencengkeram dan termarginalisasinya perempuan dari berbagai aspek kehidupan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pemaparan-pemaparan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa ketidakadilan gender yang dialami perempuan-perempuan dalam novel tersebut baik pada masa pendudukan Jepang hingga para perempuan tersebut menjadi buangan dan terkungkung oleh adat istiadat di Pulau Buru, berupa stereotipe, subordinasi, kekerasan (fisik dan psikis), marginalisasi, dan beban kerja. Ketidakadilan yang dialami para perempuan dalam novel tersebut dialami pula oleh para perempuan pada realitas sosial masyarakat.

Ketidakadilan gender yang dialami para perempuan tersebut menimbulkan dampak. Dampak-dampak dari ketidakadilan gender yang dialami para perempuan di antaranya, para perempuan mengalami beban moral yang berat, beban psikis atau mental, idealisme mereka hancur, para perempuan mengalami kemerosotan peradaban dan kebudayaan serta hilangnya nilai-nilai kemanusiaan.

Perempuan baik dalam novel maupun dalam realitas sosial belum mampu keluar dari keterkungkungan yang mereka alami. Hal tersebut merupakan pengaruh dari adat dan tradisi khususnya budaya patriarki, lingkungan tempat tinggal, ketidakberdayaan atau sikap pasrah dan termarginalkannya kaum perempuan dari berbagai aspek kehidupan yang tidak menguntungkan dirinya. Hal tersebut tidak sejalan dengan gagasan feminisme sosialis. Bagi kaum feminisme sosialis, perempuan harus berani keluar dari ketidakberdayaan atau ketidakadilan yang dialaminya dengan cara memerangi konstruksi visi dan ideologi masyarakat



yang dibangun atas bias gender. Tujuannya satu yaitu menciptakan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan.

Berangkat dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan gender menimbulkan ketidakadilan gender terutama terhadap perempuan. Apalagi pada realitas penjajahan Jepang di Indonesia, perempuan Indonesia memang mengalami ketidakadilan. Dari ketidakadilan gender tersebut, telah berujung pada dampak-dampak yang merugikan para perempuan.

## **B. Saran**

Masalah perempuan dan ketidakadilan gender yang dialaminya merupakan salah satu objek yang seringkali diteliti. Namun, permasalahan yang dialami oleh perempuan berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut, disarankan kepada pembaca untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai penelitian ini, khususnya ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan. Selain itu, disarankan pula kepada pembaca untuk melakukan penelitian lain dengan objek yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhidarta, Syaifud. 2011. *Wanita Indonesia antara Kegelapan dan Masa Depan*.<http://kompasiana.com/wanita-indonesia-antara-kegelapan-dan-masa-depannya-356224.html>. (27 September 2013).
- Aditama, Oryza. "Peter Rohi dan Kisah Jugun ianfu Di Pulau Buru". *Saudara Tua Wordpress*, 26 Oktober 2011.[http:// Peter Rohi dan Kisah Jugun Ianfu di Pulau Buru \\_ Saudara Tua.html](http://PeterRohi.com/peter-rohi-dan-kisah-jugun-ianfu-di-pulau-buru-saudara-tua.html) (3 Desember 2013).
- Ananta Toer, Pramoedya. 2001. *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Arkasuta. 2013. *Jugun Ianfu di Indonesia, Ironi Perempuan Indonesia Masa Pendudukan Jepang*. <http://jugun-ianfu-di-indonesia-ironi.html> (27 September 2013)
- Diana, Jumianti. 2011. "Gender dalam Novel Perempuan, Rumah Kenangan karya M Aan Mansur Tinjauan Kritik Sastra Feminis". Skripsi Sarjana, Makassar: Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.
- Dien, Chaemal Noor. 2012. *Subordinasi Terhadap Perempuan*. <http://subordinasi-terhadap-perempuan.html>. (3 Desember 2013).
- Djajaneegara, Soenarjati. 2000. *Kritik Sastra Feminis: Sebuah Pengantar*. Jakarta:Gramedia.
- Fachriyani, Shanty. 2011. "Citra Tokoh Perempuan dalam Novel Dorodasih karya Iman Budhi Santosa, Relevansinya dengan Perempuan Jawa di Indonesia: Tinjauan Kritik Sastra Feminis". Skripsi Sarjana, Makassar: Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.
- Galih, Retno. 2012. *Jugun Ianfu: Potret Kelam Wanita Indonesia*.[http://www.kompasiana.com/Jugun Ianfu Potret Kelam Wanita Indonesia.html](http://www.kompasiana.com/Jugun-Ianfu-Potret-Kelam-Wanita-Indonesia.html) (27 September 2013).
- Goo, Imanuel Goubo. "Memahami Masalah Perempuan Papua dalam Budaya dan Kesehatan. *Majalah Selangkah*, 22 Juni 2012.[http://Memahami Masalah Perempuan Papua dalam Budaya dan Kesehatan\\_ Majalah Selangkah.html](http://MemahamiMasalahPerempuanPapuaDalamBudayaDanKesehatan_MajalahSelangkah.html) (5 Desember 2013).
- Hasman, Ruri Hasdyanti. 2013. "Eksistensi Tokoh Wanita dalam Novel Pertemuan Dua Hati Karya N.H. Dini: Tinjauan Kritik Sastra Feminis". Skripsi Sarjana, Makassar: Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.

- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. 2010. *Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender*. [http://Bentuk Bentuk Ketidakadilan Gender.html](http://Bentuk%20Bentuk%20Ketidakadilan%20Gender.html) (27 September 2013).
- Komnas Perempuan. 2010. *Akses Perempuan terhadap Keadilan: Mekanisme hukum dan Keadilan, Peranan Pendamping, dan Rasa Keadilan Korban*.[http://Akses- Perempuan-terhadap-Keadilan-Mekanisme-Hukum-dan-Keadilan,-Peranan Pendamping-dan-Rasa-Keadilan-Korban.html](http://Akses-Perempuan-terhadap-Keadilan-Mekanisme-Hukum-dan-Keadilan,-Peranan-Pendamping-dan-Rasa-Keadilan-Korban.html). (3 Desember 2013).
- \_\_\_\_\_. 2012. *Kebangkitan Perempuan Adat Nusantara: Peran Komnas Perempuan bersama Para Perempuan Adat Pembela HAM*. [http:// Kebangkitan Perempuan Adat Nusantara Peran Komnas Perempuan bersama Para Perempuan Adat Pembela HAM \\_ Komnas Perempuan.html](http://Kebangkitan-Perempuan-Adat-Nusantara-Peran-Komnas-Perempuan-bersama-Para-Perempuan-Adat-Pembela-HAM-Komnas-Perempuan.html). (3 Desember 2013).
- Kristiani, Etika. 2009. *“Citra Perempuan dalam Novel Saman Karya Ayu Utami Suatu Tinjauan Kritik Sastra Feminis”*. Skripsi Sarjana, Makassar: Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.
- Kusmiati. 2013. *Jugun Ianfu Sisi Lain Masa Pendudukan Jepang di Indonesia*. <http://junggun-ianfu-sisi-lain-masa-pendudukan.html> (27 September 2013).
- Lingasari, Dewi. 2004. *Suku Asmat*. <http://wikipedia.html>. (5 Desember 2013).
- Listiyani, Dimar Kartika. 2008. *Jugun Ianfu Sebagai Akibat dari Konstruksi Perempuan Sebagai “Other”*. Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia.
- Macdonald, dkk. 1999. *Gender dan Perubahan Organisasi: Menjembatani Kesenjangan antara Kesenjangan dan Praktik*. INSIST (Institute For Social Transformation).
- Mansour, Fakhri. 2012. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mariana, Anna. “Tak Ada Rotan, Akar pun Jadi” (Kisah Gedung Inspektorat Sukabumi. *Etnohistori*, Juli 2011. [http:// “Tak Ada Rotan, Akar pun Jadi” \(Kisah Gedung Inspektorat Sukabumi\) — ETNOHISTORI.html](http://Tak-Ada-Rotan,-Akar-pun-Jadi) (3 Desember 2013).
- Marisa,dkk. 2007. *Feminisme Untuk Pemula*. Yogyakarta: Resist Book.
- Megawangi, Ratna. 1999. *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan Media Utama.

- Mosse, Julia Cleves. 2007. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muslimat. 2005. "Citra Wanita dalam Cerita Rakyat Makassar Suatu Tinjauan Kritik Sastra Feminis". Tesis, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.
- Ngawur, Harus. 2013. *Jugun Ianfu dan Prostitusi pada Masa Pendudukan Jepang*. <http://jugun-ianfu-dan-prostitusi-pada-masa-penjajahan-jepang-554203.html> (27 September 2013).
- Katharina, Lita. "Penyelesaian Kasus KDRT di Papua Terbentur Hukum Adat." PortalKBR. 25 September 2013. [http://Penyelesaian Kasus KDRT di Papua Terbentur Hukum Adat.html](http://Penyelesaian%20Kasus%20KDRT%20di%20Papua%20Terbentur%20Hukum%20Adat.html) (5 Desember 2013).
- Ratna, Nyoman Kutha. 2004. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shahab, Alwi. 2009. *Hidup pada Masa Pendudukan Jepang*. <http://hidup-pada-masa-pendudukan-jepang.html> (27 September 2013).
- Sugihastuti. 2007. *Teori Apresiasi Sastra*. Yogyakarta: Putaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_ dan Itsna Hadi Saptiawan. 2010. *Gender dan Inferioritas Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_ dan Siti Hariti Sastriyani. 2007. *Glosarium Seks dan Gender*. Yogyakarta:Carasvatibooks.
- \_\_\_\_\_ dan Suharto. 2010. *Kritik Sastra Feminis Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugono, Dendy. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suryabrata, Drs. Sumadi. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tim Bali Sruti. "Lupakan Marginalisasi, Muliakan Perempuan." *Majalah Tim Bali Sruti*, 28 September 2011. [http://Lupakan Marginalisasi, Muliakan Perempuan \\_ Bali Sruti.html](http://Lupakan%20Marginalisasi,%20Muliakan%20Perempuan_%20Bali%20Sruti.html). (5 Desember 2013).
- Umar, Nasaruddin. 2010. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran*. Jakarta: Dian Rakyat.

Wardani, Eka Harisma. 2009. “*Belunggu-Belunggu Patriarki: Sebuah Pemikiran Feminisme Psikoanalisis Toni Morisson dalam The Bluest Eye*”. Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.

Wiyatmi. 2012. *Kritik Sastra Feminis (Teori dan Aplikasinya dalam Sastra Indonesia)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Zulfaira, Agun. 2011. *Pembangunan, dan Perempuan dalam Perspektif Feminis Sosialis*. <http://www.agunzulfaira.blogspot.com> (27 September 2013).